



RENCANA STRATEGIS **TAHUN 2025 - 2029**



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BENGKAYANG





BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029, perlu Menyusun Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 31. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
 32. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
 33. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
 34. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan/subkegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
10. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

11. Program adalah Penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah dengan hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
13. Sub kegiatan adalah bagian paling rinci dan spesifik dari sebuah program pembangunan daerah. Sub kegiatan merupakan penjabaran atau implementasi dari sebuah kegiatan yang lebih besar yang sudah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.
14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi Pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 4

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Tahun 2025-2029 serta pendanaan indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Pendanaan indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kerangka pendanaan yang terdapat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah pada tahun berkenaan.

Pasal 5

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat 2 terdiri atas :
 - a. Inspektorat;
 - b. Sekretariat Daerah;
 - c. Sekretariat DPRD;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Badan Pendapatan Daerah;
 - g. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
 - j. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - k. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - l. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - n. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
 - o. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 - p. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
 - q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - r. Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - s. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - t. Dinas Perhubungan;

- u. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - v. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - x. Dinas Perikanan;
 - y. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - z. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - a.a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - a.b. 17 (Tujuh Belas) Kecamatan.
- (2) Rencana Strategis Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika :

BAB.I	:	PENDAHULUAN
BAB.II	:	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB.III	:	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB.IV	:	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB.V	:	PENUTUP

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah dan menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah dan

perubahan pagu indikatif Perangkat Daerah, maka perubahan tersebut dilakukan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS



Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARI DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,



SEBASTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR ..415..

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders*. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi pedoman dan arahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang agar proses pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga visi RPJMD Kabupaten Bengkayang dapat terwujud. Dalam menjabarkan Renstra Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 ini disusun melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan di pusat dan daerah, partisipasi seluruh pejabat Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang, serta dengan memperhatikan arah reformasi perencanaan dan penganggaran yang telah ditentukan. Renstra ini juga disusun dengan semangat untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan sebagai landasan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam menentukan arah pembangunan bidang perhubungan ke depan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra masih banyak kekurangan. Kami membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini apabila dilakukan review atas Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 di masa mendatang.

Akhirnya, kami berharap semoga Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan dan transportasi di Kabupaten Bengkayang.

Bengkayang, September 2025
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Bengkayang

Francisca Cynthia Ento, S.P., M.M.

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19750716 200003 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	5
1.3 Maksud Dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	17
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.2 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan	48
2.3 Isu strategis.....	63
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..	70
3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan	70
3.2 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan	75
3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan.....	81
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	83
4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif	83
4.2 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	209
4.3 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	210
BAB V PENUTUP	211
DAFTAR LAMPIRAN.....	213

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	35
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	35
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Perjenjangan	36
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf.....	36
Tabel 2.5 Aset Sarana/Prasarana	36
Tabel 2. 6 Tabel Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	40
Tabel 2. 7 Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	42
Tabel 2.8 Hasil Evaluasi Capaian Anggaran	43
Tabel 2. 9 Kelompok Sasaran Layanan.....	44
Tabel 2. 10 Mitra Perangkat Daerah	46
Tabel 2. 11 Kerja sama Daerah dalam Kewenangan Perangkat Daerah.....	47
Tabel 2. 12 Pemetaan Permasalahan Pelayanan.....	48
Tabel 2.13 Hubungan Misi Daerah dan Pusat.....	61
Tabel 2. 14 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	64
Tabel 2. 15 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi.....	66
Tabel 2. 16 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang ditinjau dari Implikasi RTRW.....	67
Tabel 2.17 Keterkaitan Isu Strategis Perangkat Daerah dengan Potensi Daerah, KLHS, dan Isu Lingkungan Dinamis	69
Tabel 3.1 Tabel Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra	72
Tabel 3.2 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra.....	79
Tabel 3.3 Penetapan Rencana Strategis	80
Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	82
Tabel 4. 1 Tabel Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	84
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	144
Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	208
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama	209
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci	210

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Bengkayang	2
Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang.....	30
Gambar 2.2 Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

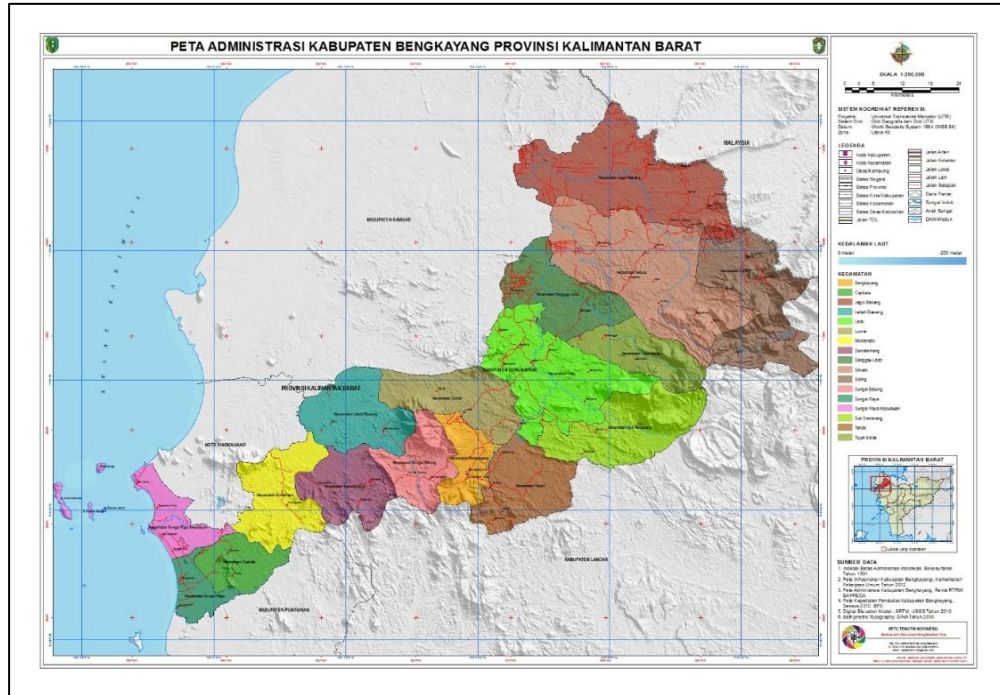
1.1 Latar Belakang

Secara umum kabupaten Bengkayang dapat diakses melalui transportasi darat dengan waktu tempuh \pm 4 jam dari Kota Pontianak dan \pm 1,5 jam dari Kota Singkawang, sehingga membuat lalu lintas barang dan jasa semakin cepat yang sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat.

Mengingat karakteristik sebagaimana disebutkan di atas; maka arah kebijakan pembangunan; selain menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar; juga dapat menyisir permasalahan kekhususan wilayah, yakni kelautan dan kemaritiman, daratan dan perbukitan, serta kawasan perbatasan negara.

Menempatkan posisi strategis Kabupaten Bengkayang yang memiliki garis perbatasan negara dalam negosiasi dan posisi tawar terhadap pemerintah pusat perlu dilakukan agar program dan proyek strategis nasional serta prioritas nasional dapat diraih Kabupaten Bengkayang agar dapat mempercepat pencapaian visi misi daerah.

Peta wilayah Kabupaten Bengkayang secara umum dapat dilihat pada **Gambar 1.1** berikut.



Sumber: Peta Tematik Indonesia

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Bengkayang

Berdasarkan peta wilayah dan geografis di atas, Kabupaten Bengkayang terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi, menyebabkan tingginya beban kebutuhan akan infrastruktur terutama dari segi jalan yaitu jalan yang dilengkapi dengan perambuan dan sarana prasarana perhubungan sebagai kelengkapan keselamatan bagi pengguna jalan (masyarakat). Mendukung aktifitas masyarakat perlu adanya sebuah sistem transportasi yang saling terkoneksi antar ruas jalan. Selain tingginya kebutuhan akan infrastruktur masih terdapat kendala keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, dan keuangan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan.

Tantangan dan permasalahan dalam pelayanan sektor perhubungan secara nasional umumnya masih dihadapkan pada peningkatan infrastruktur, kelancaran dan keselamatan mobilitas angkutan darat, laut dan udara, serta aksesibilitas pelayanan terutama pada pelayanan jasa transportasi di wilayah terpencil dan perbatasan yang belum seluruhnya dapat dijangkau secara memadai. Terbatasnya

pendanaan pemerintah daerah untuk pengadaan fasilitas baru, serta pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana transportasi yang telah ada, tingkat ketersediaan armada angkutan yang masih sangat terbatas dalam mengakomodasi pergerakan barang dan penumpang khususnya pada wilayah-wilayah terpencil menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat terpencil kurang dapat berkembang. Menghadapi tantangan dan permasalahan tersebut perlu adanya pembentukan dan susunan perangkat daerah yang memiliki kewenangannya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Rencana Strategis ini memuat suatu dokumen perencanaan yang berisi tentang visi yang akan dituju oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 5 (lima) tahun ke depan yang dijabarkan dalam beberapa misi yang mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas disertai arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan untuk pencapaiannya.

Pedoman penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal (ranwal) Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir) Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Selain itu, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 menjabarkan keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan spasial dan aspaspial. Penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta memperhatikan dokumen seperti RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Oleh karena itu, berbagai program pembangunan yang dilakukan diharapkan dapat mempercepat **"Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan"**.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

- Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 517);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 76 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Transportasi Cerdas di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1009);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2004 - 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
34. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 60 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 60);
35. Peraturan Bupati No 24 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor

Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 24).

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien, dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Bengkayang dengan memperhatikan arahan RPJPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2045, serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Bengkayang.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Dinas Perhubungan untuk menyusun Renja OPD, serta sekaligus merupakan acuan penentuan program kegiatan tahunan OPD yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Bengkayang secara berjenjang.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Bupati/Wakil Bupati Bengkayang ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;

2. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Bengkayang, APBD Kalimantan Barat, APBN, dan sumber dana lainnya;
3. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar OPD, maupun antar Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, dengan Pemerintah Provinsi, dan dengan Pemerintah Pusat;
4. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang;
5. Menciptakan iklim pemerintahan yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
6. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten

Bengkayang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian- capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan- hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang ini.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang, struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.1.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang periode sebelumnya.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Pada Bagian ini Perangkat Daerah yaitu Dinas Perhubungan lebih berorientasi pada pelayanan langsung kepada masyarakat luas. Hal ini mencakup penyediaan layanan transportasi yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Dengan pendekatan yang berfokus pada inklusivitas dan responsivitas, Dinas Perhubungan berperan penting dalam memastikan bahwa sistem transportasi dapat diakses dan digunakan oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

2.2 Permasalahan Perangkat Daerah

Permasalahan Pelayanan di Dinas Perhubungan berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang.

2.3 Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan perangkat daerah;
2. sasaran jangka menengah pada renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari renstra perangkat daerah Provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra perangkat daerah tahun rencana.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang. Pernyataan tujuan jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang beserta indikator kerjanya.

3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan

Pada bagian ini Strategi perangkat daerah berisi serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun berdasarkan analisis situasi internal dan eksternal, serta diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang dalam lima tahun mendatang.

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan merupakan penjabaran operasional dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Penyusunan ketiga unsur ini mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, yang memuat klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Setiap Program merupakan kumpulan kegiatan yang dirancang untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuan pembangunan. Program dijabarkan ke dalam Kegiatan, yang merupakan upaya lebih terfokus untuk menghasilkan keluaran (output).

4.2 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD

Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 ditetapkan secara sistematis melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan mandat dan fungsi utama Perangkat Daerah.

IKU disusun untuk mencerminkan keterkaitan langsung antara misi, tujuan strategis, dan sasaran kinerja dengan hasil (outcome) yang diharapkan dari pelaksanaan program/kegiatan, serta berperan sebagai alat pengendalian manajerial dalam mengukur capaian kinerja secara objektif dan akuntabel.

4.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah daerah Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada periode 2025–2029 ditetapkan melalui serangkaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merepresentasikan hasil nyata dari pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang secara langsung mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan urusan wajib maupun pilihan, sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran melalui Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

BAB V Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 60 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang.

2.1.1 Tugas Pokok Organisasi

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten.

2.1.2 Fungsi Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut sebagai berikut :

- 1) perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- 3) evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- 4) pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain di Bidang Perhubungan yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Kepala Dinas dalam hal berhalangan maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilaksanakan oleh Sekretaris Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan dinas, penyelenggaraan surat menyurat, kepegawaian, pengelolaan keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan dan ketatalaksanaan dinas serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan program kerja;
2. pengelolaan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;
3. pengelolaan administrasi keuangan;
4. pengelolaan administrasi sarana dan prasarana;
5. pengelolaan urusan rumah tangga;
6. pengelolaan kearsipan, ketatausahaan;
7. pengkoordinasian kegiatan hari-hari besar Nasional yang relevan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas; dan

8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Dinas dibantu oleh:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dinas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, inventarisasi barang, perlengkapan, perjalanan dinas kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
- c. pelaksanaan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- d. pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- f. penyiapan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- g. penyiapan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
- h. penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan

- melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- i. penyiapan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - j. penyiapan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kependidikan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
 - k. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - l. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai standar yang ditetapkan; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai bidang tugas.

2. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyelenggarakan urusan rencana kerja dan keuangan Dinas Perhubungan dalam mengelola keuangan, menyusun anggaran tahunan, menyusun pelaporan keadaan kas Dinas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pada sub bagian rencana kerja dan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban serta laporan keuangan;

- c. pelaksanaan penyiapan dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - e. penyusunan laporan keuangan;
 - f. verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
 - g. pengusulan, penyusunan, perumusan, penginventarisasian program kerja tahunan untuk dibahas dalam rencana pembangunan daerah;
 - h. penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
 - i. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
 - j. penyiapan dan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK);
 - k. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai standar yang ditetapkan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- c. Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Keselamatan

Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Keselamatan adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Keselamatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perhubungan dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Keselamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Keselamatan;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Keselamatan;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Keselamatan;
4. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Keselamatan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Keselamatan dibantu oleh:

1. Seksi Lalu Lintas dan Perparkiran

Seksi Lalu Lintas dan Perparkiran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Keselamatan dalam pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dan pengendalian kegiatan lalu lintas dan perparkiran. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Lalu Lintas dan Perparkiran menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
- c. Fasilitasi penerbitan izin penyelenggaraan perparkiran;
- d. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
- e. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan kabupaten;
- f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;

- g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten;
- h. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- i. Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;
- j. Fasilitasi penerbitan izin usaha untuk badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal;
- k. Fasilitasi penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- l. Fasilitasi penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- m. Fasilitasi penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- n. Fasilitasi penerbitan izin pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- o. pemberian fasilitasi Pengawasan Pejabat Negara/Daerah;
- p. pelaksanaan evaluasi dan penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Seksi Angkutan dan Keselamatan

Seksi Angkutan dan Keselamatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Keselamatan dalam pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dan pengendalian kegiatan angkutan dan keselamatan. Dalam

melaksanakan tugas pokok, Seksi Angkutan dan Keselamatan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- c. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah Kabupaten dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- d. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- e. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- f. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- g. Fasilitasi penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- h. Fasilitasi penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- i. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- j. Fasilitasi penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kabupaten;
- k. Fasilitasi penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang

- berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten;
- l. Fasilitasi penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha;
 - m. Fasilitasi penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
 - n. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten;
 - o. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten;
 - p. penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten;
 - q. pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
 - r. pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten/kota;
 - s. pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;
 - t. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas;
 - u. pelaksanaan evaluasi dan penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- d. Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi

Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perhubungan dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi;
4. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi terdiri dari:

1. Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi Darat

Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi Darat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi dalam pengumpulan, pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dan pengendalian kegiatan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan Sarana Prasarana

dan Pengembangan Transportasi Darat. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
 - b. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis pada Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi Darat;
 - c. pengolahan dan analisis bahan perumusan kebijakan teknis pada Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi Darat;
 - d. pengendalian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi Darat;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi Pelayaran dan Penerbangan.

Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi Pelayaran dan Penerbangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi dalam pengumpulan, pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dan pengendalian kegiatan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi Pelayaran dan Penerbangan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi Pelayaran dan Penerbangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program kerja;

- b. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis pada Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi Pelayaran dan Penerbangan;
- c. pengolahan dan analisis bahan perumusan kebijakan teknis pada Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi Pelayaran dan Penerbangan;
- d. pengendalian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi Pelayaran dan Penerbangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan. Unit Pelaksanaan Teknis mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

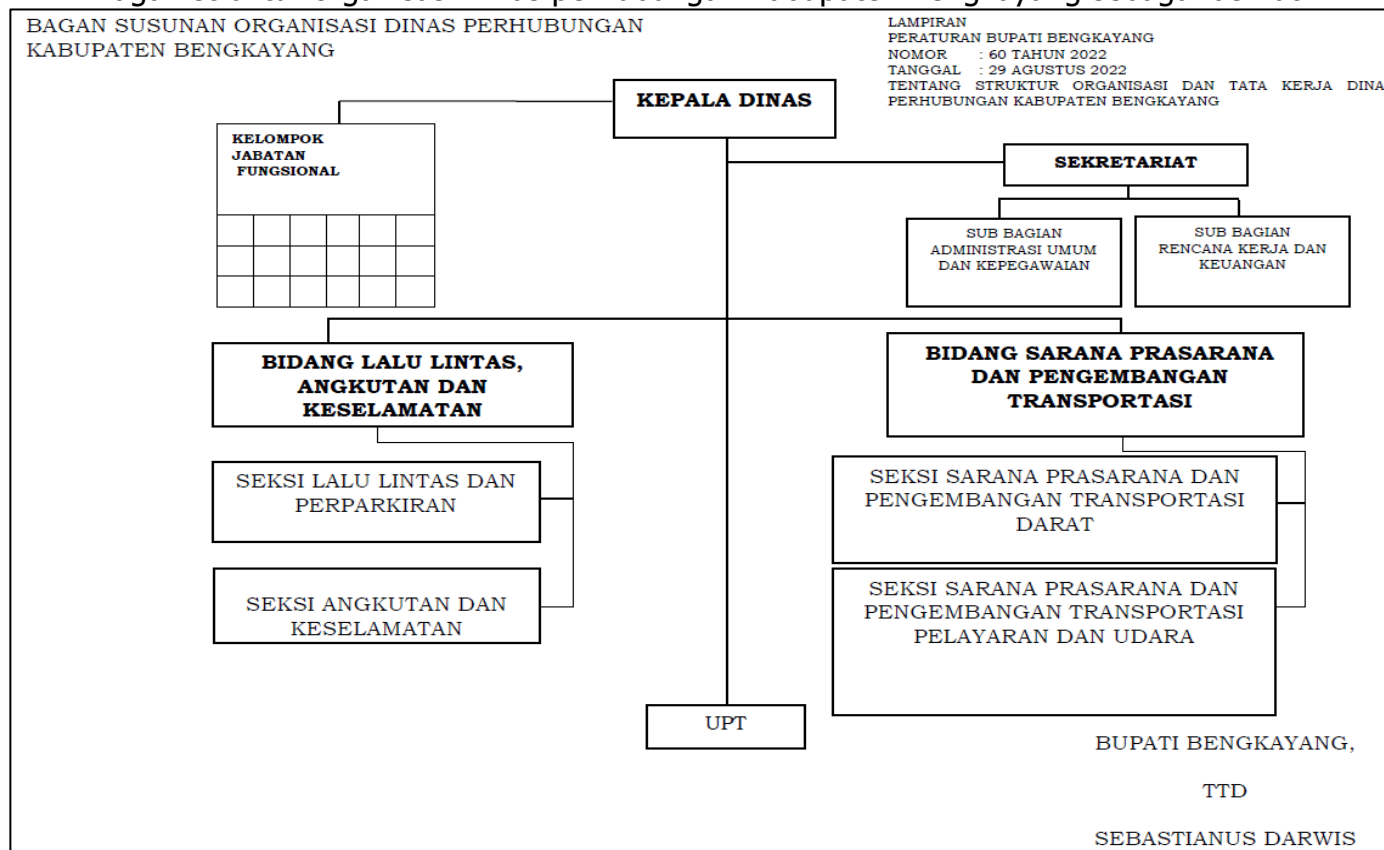
1. pemberian pelayanan bidang perhubungan;
2. pelaksanaan pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi bidang perhubungan;
3. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait berkaitan dengan bidang perhubungan;
4. pelaksanaan verifikasi dan validasi data bidang perhubungan;
5. pelaporan dan pertanggung jawaban bidang perhubungan kepada dinas instansi pelaksana;

6. penghimpunan, pengagendaan dan penyimpanan dokumen bidang perhubungan;
 7. pertanggung jawaban bidang perhubungan kepada Instansi pelaksana; dan
 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas khusus sesuai keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bagan struktur organisasi Dinas perhubungan Kabupaten Bengkulu sebagai berikut:



Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

2.1.3 Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor

Peraturan Bupati No 24 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bengkayang UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas yang dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Susunan Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari:

a. Kepala UPTD

Kepala UPTD mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan teknis operasional dinas di bidang pengujian kendaraan bermotor. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) penyusunan rencana dan program kerja;
- 2) pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 3) pengolahan dan analisis bahan perumusan kebijakan teknis pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 4) pengendalian pelaksanaan kegiatan pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 5) pelaksanaan evaluasi dan penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD menyelenggarakan urusan antara lain Surat menyurat, Kearsipan, Rumah tangga, Inventarisasi barang, Perlengkapan, Perjalanan dinas Kerjasama, Hukum, Hubungan Masyarakat, Keprotokolan, Arsip, dan Dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) penyusunan rencana kegiatan;
- 2) pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
- 3) pelaksanaan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- 4) pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu,
- 5) hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- 6) pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- 7) penyiapan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- 8) penyiapan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
- 9) penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

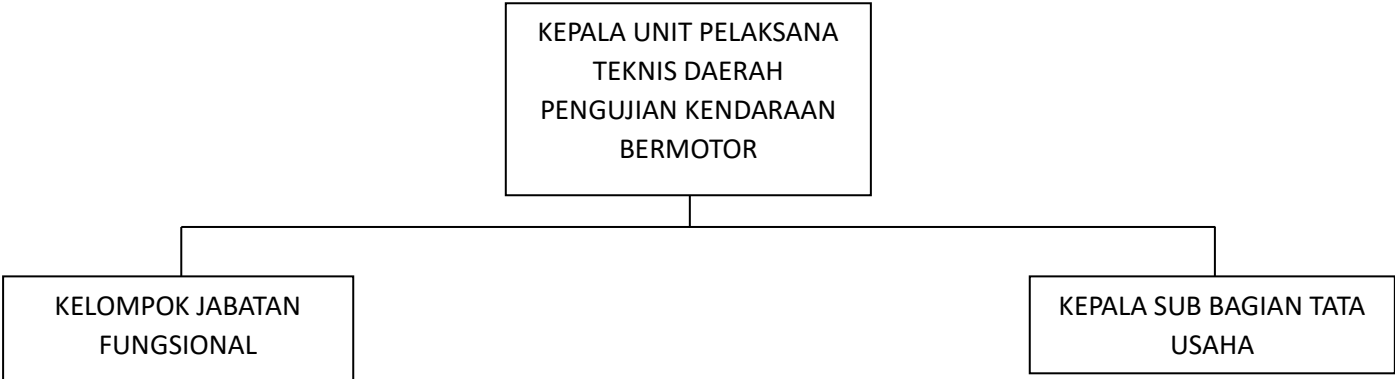
- 10)penyiapan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- 11)penyiapan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
- 12)penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- 13)pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai standar yang ditetapkan; dan
- 14)pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai bidang tugas

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari pegawai negeri sipil negara (ASN) dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan di bidang tertentu.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bagan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bengkayang sebagai berikut:



Gambar 2.2 Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bengkayang

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

2.1.4 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang

Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti peralatan/ perlengkapan/aset.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	L	P	JUMLAH
1	Golongan IV	3	1	4
2	Golongan III	14	6	20
3	Golongan II	8	5	13
4	Golongan I	0	0	0
JUMLAH		25	12	37

Sumber: Dishub Kab. Bengkayang Tahun 2025

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	L	P	JUMLAH
1	Pendidikan S2	2	1	3
2	Pendidikan S1	8	1	9
3	Pendidikan D4	1	5	6
4	Pendidikan D3	7	5	12
5	Pendidikan D2	2	0	2
6	Pendidikan SMA/SMK	4	0	4
7	Pendidikan Paket B/C	1	0	1
JUMLAH		25	12	37

Sumber: Dishub Kab. Bengkayang Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

c. Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Perjenjangan

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Perjenjangan

NO	PELATIHAN PENJENJANGAN	JUMLAH
1	PIM II	1
2	PIM III	2
3	PIM IV	1
JUMLAH		4

Sumber: Dishub Kab. Bengkayang Tahun 2025

d. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Eselon II B (Kepala Dinas)	1
2	Eselon III A (Sekretaris)	1
3	Eselon III B (Kepala Bidang)	2
4	Eselon IV A (Kassubag/Kasi)	6
JUMLAH		10

Sumber: Dishub Kab. Bengkayang Tahun 2025

2.2.2 Sarana dan Prasarana / Sumber Daya Lainnya

Sumber Daya lainnya seperti peralatan, perlengkapan baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak (sarana dan prasarana) dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2.5 Aset Sarana/Prasarana

NO	SARANA/ PRASARANA	NILAI	KETERANGAN
1	TANAH	172.076.840	Berdasarkan data KIB A
2	PERALATAN DAN MESIN	10.214.500.699	Berdasarkan data KIB B
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	18.032.353.323	Berdasarkan data KIB C
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	3.110.203.441	Berdasarkan data KIB D

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

NO	SARANA/ PRASARANA	NILAI	KETERANGAN
5	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	145.090.599	Berdasarkan data KIB F
6	ASET LAINNYA	21.796.510.525,61	Berdasarkan data KIB
Jumlah		43.335.199.731,15	

Sumber: Data Base Simbada Bengkayang tahun 2025

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

2.1.5 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang

Kinerja pelayanan perangkat daerah periode 2021-2024 terdapat beberapa indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang mencapai sesuai data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat untuk pengelolaan (manajemen) kinerja dan juga alat pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap publik. LKIP ini berisi penjelasan, analisis dan evaluasi kinerja pelaksanaan urusan perhubungan terhadap satu sasaran yang ditargetkan di tahun 2024 melalui 8 (delapan) indikator sasaran. Capaian target kinerja indikator jumlah arus penumpang angkutan umum 107,10%, capaian target kinerja untuk indikator jumlah ijin trayek 200%, capaian target kinerja untuk indikator jumlah uji kir angkutan umum 100,44%, capaian kinerja untuk indikator pembangunan pelabuhan laut/sungai 200%, capaian kinerja untuk indikator persentase kepemilikan kir angkutan umum 103%, capaian kinerja untuk indikator pemasangan rambu – rambu lalu lintas 355%, capaian jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum mencapai 107,10%, dan capaian jumlah orang / barang melalui dermaga / bandara / terminal mencapai 107,10%.

Dari ke-8 indikator kinerja tersebut, disimpulkan Indikator yang tidak mencapai target di bawah batasan kriteria nilai kualitatif pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang tahun 2024 tidak ada (nihil) karena dari 8



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

(delapan) indikator kinerja yang ditetapkan semuanya telah mencapai target dengan serapan anggaran (realisasi *input*) sebesar 97,46% yang menggunakan serapan realisasi anggaran sebesar Rp11.755.957.847. Indikator ini bertujuan untuk mencapai sasaran terwujudnya sistem transportasi publik yang representatif bagi aktivitas perekonomian masyarakat, seperti pada tabel di bawah ini.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

Tabel 2. 6 Tabel Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

No.	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Kinerja		
					Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	$7=(6:5) \times 100$	
1	Meningkatnya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	1	Jumlah arus penumpang angkutan Umum	Orang	510.010	546.196	107
		2	Jumlah ijin trayek	Ijin	2	4	200
		3	Jumlah uji kir angkutan umum	Kendaraan	229	230	100
		4	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis				
		a	Pelabuhan Sungai	Unit	1	2	200
		b	Terminal Bis	Unit	0	0	0,00
		5	Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum	%	40,00	41,00	103
		6	Pemasangan Rambu-rambu	Unit	60	213	355
7	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang	510.010	546.196	107		
8	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	Orang	510.010	546.196	107		
Rata - rata pencapaian						159,91	

Sumber: LKIP Dinas Perhubungan Tahun 2024



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

- 2.1.5.1 Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Adapun capaian kinerja Dinas Perhubungan dapat dilihat pada **Tabel 2.7**
- 2.1.5.2 Hasil Evaluasi Capaian Anggaran
Penganggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang kurun waktu lima tahun berlalu, akan disajikan dalam kondisi ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah anggaran, seperti pada **Tabel 2.8**

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Tabel 2. 7 Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah arus penumpang angkutan Umum				415.049	460.086	484.405	510.010	536.968	415.051	460.086	486.728	546.196	-	100,00	100,00	100,48	107,10	-
2	Jumlah ijin trayek				3	3	2	2	2	1	3	4	4	-	33,33	100,00	200,00	200,00	-
3	Jumlah uji kir angkutan umum				202	215	222	229	236	200	175	226	230	-	99,01	81,40	101,80	100,44	-
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis													-					-
	a Pelabuhan sungai				0	0	1	1	1	4	0	6	1	-	-	-	600,00	100,00	-
	b Terminal Bis				1	1	0	1	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
5	Persentase Layanan Angkutan Darat				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum				11,51	15	20	40	50	12	17	34	28	-	104,26	113,33	170,00	70,00	-
7	Pemasangan Rambu-rambu				0	60	60	60	60	0	60	84	213	-	0,00	100,00	140,00	355,00	-
8	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum				415.049	460.086	484.405	510.010	536.968	415.051	460.086	486.728	546.196	-	100,00	100,00	100,48	107,10	-
9	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun				415.049	460.086	484.405	510.010	536.968	415.051	460.086	486.728	546.196	-	100,00	100,00	100,48	107,10	-

Sumber: Dishub Kab. Bengkulu Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Tabel 2.8 Hasil Evaluasi Capaian Anggaran

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH	13.174.684.051	14.224.750.389	12.062.375.708	6.328.777.942		9.678.267.594	14.133.086.552	11.755.953.843			73,4611	99,3556	97,45969				
BELANJA OPERASI	5.690.039.175	7.310.047.833	6.733.920.728	6.326.063.942		4.684.841.354	7.250.494.552	6.527.799.213			82,33408	99,18532	96,93906				
- Belanja Pegawai	2.284.861.325	2.848.679.429	3.100.761.398	3.395.162.009		2.103.763.863	2.831.812.807	3.048.950.893			92,07403	99,40791	98,3291				
- Belanja Barang dan Jasa	3.149.303.850	4.341.368.404	3.566.159.330	2.930.901.933		2.463.953.491	4.298.681.745	3.411.848.320			78,23804	99,01675	95,67291				
- Belanja Bantuan Sosial	255.874.000	120.000.000	67.000.000			117.124.000	120.000.000	67.000.000			45,77409	100	100				
BELANJA MODAL	7.484.644.876	6.914.702.556	5.328.454.980	2.714.000		4.993.426.240	6.882.592.000	5.228.154.630			66,71561	99,53562	98,11765				
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.339.700.276	79.044.000	897.075.000	2.714.000		3.447.793.640	75.030.000	845.330.000			103,2366	94,92182	94,23181				
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.370.000.000	5.900.700.000	4.308.899.980			228.723.000	5.881.154.000	4.265.998.630			6,787033	99,66875	99,00435				
- Belanja Modal Jalan, Jaringan & Irigasi	774.944.600	934.958.556	122.480.000			1.316.909.600	926.408.000	116.826.000			169,936	99,08546	95,38374				
Total	13.174.684.051	14.224.750.389	12.062.375.708	6.328.777.942		9.678.267.594	14.133.086.552	11.755.953.843			73,4611	99,3556	97,4597				

Sumber: Dishub Kab. Bengkayang Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

2.1.6 Kelompok Sasaran Layanan

Identifikasi kelompok sasaran pelayanan dilakukan berdasarkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan. Berikut ini adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari perangkat daerah selama periode perencanaan strategis:

Tabel 2. 9 Kelompok Sasaran Layanan

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1.	Pengaturan Lalu Lintas dan Keselamatan Transportasi	menyediakan layanan seperti pengaturan lalu lintas, pengelolaan terminal, dan pengujian kendaraan bermotor untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.	Masyarakat Umum
2.	Pelayanan Angkutan Pelajar dan Mahasiswa	menyediakan layanan angkutan gratis bagi Pelajar dan Mahasiswa untuk memastikan aksesibilitas pendidikan yang lebih mudah, aman dan terjangkau.	Pelajar dan Mahasiswa
3.	Penyediaan Fasilitas	menyediakan fasilitas seperti halte ramah disabilitas dan jalur	Kelompok Rentan

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

		akses yang memadai. Kementerian Perhubungan juga mendorong kesetaraan aksesibilitas transportasi bagi kelompok disabilitas, lanjut usia, anak-anak, serta ibu hamil.	
4.	Pembinaan bagi Pengusaha dan Operator Transportasi	Memberikan layanan perizinan operasional, pengujian kendaraan bermotor (KIR), serta pengelolaan terminal dan angkutan umum untuk memastikan operasional transportasi yang sesuai dengan regulasi dan standar keselamatan.	Pengusaha dan Operator Transportasi

Sumber: Dishub Kab. Bengkayang Tahun 2025

Seiring dengan penambahan jumlah penduduk Kabupaten Bengkayang yang mana membutuhkan peningkatan pelayanan khususnya di bidang perhubungan maka Kelompok sasaran layanan Dinas Perhubungan (Dishub) mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyediakan sistem transportasi yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

2.1.7 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian Pelayanan

Guna meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, perangkat daerah tidak dapat bekerja secara sendiri. Kemitraan dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif. Mitra perangkat daerah mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, hingga media, yang masing-masing berperan strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu, identifikasi dan penguatan kolaborasi dengan mitra menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan publik di daerah.

Tabel 2. 10 Mitra Perangkat Daerah

No	Mitra PD	Sasaran Layanan	Jenis Layanan
1.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Masyarakat Umum, Pelajar dan Mahasiswa serta Disabilitas dan Lansia	Pengaturan Lalu Lintas dan Pengamanan Jalur
2.	PT. Jasa Raharja	Masyarakat Umum, Pelajar dan Mahasiswa serta Disabilitas dan Lansia	Jaminan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas, Kerja sama pelayanan terpadu
3.	Akademisi	Pelajar dan Mahasiswa	Pelopor Keselamatan Lalu Lintas

Sumber: Dishub Kab. Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

2.1.8 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat

Kerja sama antar daerah maupun dengan pihak ketiga merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat daerah memiliki peran strategis dalam merancang, melaksanakan, dan mengawal kerja sama tersebut agar sejalan dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, identifikasi bentuk kerja sama yang telah dilakukan serta evaluasi atas pelaksanaannya menjadi bagian penting dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

Tabel 2. 11 Kerja sama Daerah dalam Kewenangan Perangkat Daerah

No	Mitra Kerja Sama	Bentuk Kerja Sama
1.	Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD	Dokumen Perjanjian Kerja Sama Pola Pembibitan Pemda
2.	Dinas Perhubungan Kota Singkawang	Perjanjian Kerja Sama (PKS) Terkait Blue Sistem Full Cycle

Sumber: Dishub Kab. Bengkayang Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

2.2 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 12 Pemetaan Permasalahan Pelayanan

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Permasalahan Manajerial	Bagaimana meningkatkan kapasitas aparatur dan kinerja manajerial Dishub agar sesuai dengan regulasi dan standar pelayanan?	<ul style="list-style-type: none">- Aparatur belum memahami secara memadai regulasi perhubungan- SOP belum diterapkan optimal- Keterbatasan SDM bersertifikat kompetensi di bidang perhubungan darat & laut- Fasilitas pengujian kendaraan bermotor belum memadai
2.	Permasalahan Lalu Lintas & Angkutan Jalan	Bagaimana mewujudkan sistem transportasi darat yang tertib, aman, nyaman, ramah lingkungan, terjangkau, serta didukung sarana prasarana yang memadai?	<ul style="list-style-type: none">- Pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan kapasitas jalan- Belum ada angkutan umum yang memenuhi standar kenyamanan, keamanan, dan ramah lingkungan- Jaringan trayek belum optimal- Disiplin awak kendaraan dan masyarakat masih rendah- Tidak ada layanan angkutan umum yang tepat waktu- Maraknya angkutan ilegal (pickup/angkutan barang untuk penumpang)- Belum tersedia terminal tipe C di Kec. Bengkayang- Fasilitas terminal tipe C di Seluas & Sungai Raya belum sesuai SPM- Tidak ada fasilitas parkir khusus dari pemerintah daerah- Kurang tersedia pelabuhan pengumpan lokal laut/sungai

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Permasalahan Sarana Prasarana Keselamatan Jalan	Bagaimana meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana keselamatan jalan di Kabupaten Bengkayang?	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah fasilitas keselamatan jalan masih terbatas - Banyak perlengkapan keselamatan jalan rusak - Jumlah halte tidak mencukupi - Rasio ketercukupan PJU, APILL, dan rambu lalu lintas masih rendah dibanding panjang jalan
---	--	---

Sumber: Dishub Kab. Bengkayang Tahun 2025

Permasalahan Pelayanan di Dinas Perhubungan berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang. Hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang, antara lain sebagai berikut.

1. Permasalahan yang berkaitan dengan managerial Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang
 - a. Kurangnya pemahaman aparatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Belum optimalnya penerapan SOP dalam pelaksanaan kinerja dan kegiatan rutin administrasi perkantoran.
 - c. Belum tersedianya SDM bidang Perhubungan yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Perhubungan Darat dan Perhubungan Laut.
 - d. Belum optimalnya fasilitas dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Bengkayang.
2. Permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan teknis bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - a. Bertambahnya jumlah kendaraan yang mengakibatkan peningkatan volume lalu lintas;
 - b. Belum tersedia angkutan umum yang aman, nyaman, ramah lingkungan dan terjangkau;
 - c. Belum optimalnya jaringan trayek yang terlayani;

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

- d. Kurang disiplinnya para awak kendaraan umum dan masyarakat pengguna angkutan umum;
 - e. Belum tersedianya angkutan umum yang tepat waktu;
 - f. Tingginya penggunaan angkutan ilegal (kendaraan bak terbuka/*pick up* / angkutan barang);
 - g. Belum tersedianya terminal tipe c untuk angkutan umum di Kec. Bengkayang.
 - h. Belum optimalnya pelayanan dan fasilitas yang sesuai dengan SPM terminal tipe c di Kec. Seluas dan Kec. Sungai Raya.
 - i. Belum tersedianya lokasi fasilitas parkir khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengurangi kemacetan di pusat kota.
 - j. Belum terselenggaranya pelayanan pelabuhan pengumpan lokal laut atau sungai di Kabupaten Bengkayang.
3. Permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan teknis bidang Sarana Prasarana Keselamatan Jalan
- a. Kurangnya jumlah kelengkapan sarana prasarana keselamatan jalan;
 - b. Banyaknya perlengkapan keselamatan jalan yang rusak;
 - c. Kurangnya jumlah halte untuk peningkatan ketertiban masyarakat dalam pemanfaatan fasilitas yang tersedia;
 - d. Masih rendahnya rasio ketercukupan fasilitas keselamatan lalu lintas dengan panjang jalan di Kabupaten Bengkayang (PJU, APILL, dan Rambu Lalu Lintas).

Memperhatikan potensi dan isu-isu strategis sebagaimana dikemukakan di atas, maka kondisi Kabupaten Bengkayang yang akan diwujudkan hingga tahun 2029 yaitu:

" SDM MANTAP BENGKAYANG GEMILANG "

Penguatan SDM yang mantap memiliki korelasi yang erat dengan meningkatnya taraf ekonomi masyarakat serta untuk menekan jumlah penduduk miskin dan pengangguran untuk menjadikan Kabupaten

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bengkayang menjadi daerah lebih maju dengan mengoptimalkan potensi bonus demografi dan sumber daya alam. Oleh sebab itu, SDM Mantap termaktub dalam visi dan misi, melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk penghidupan masyarakat Kabupaten Bengkayang yang layak/seimbang jasmani dan rohani serta berdaya saing. Oleh karena itu diperlukan upaya mewujudkan Bengkayang Baru, yaitu Bengkayang yang berubah, bergerak, berinovasi dan berdampak bagi pembangunan serta mengutamakan pelayanan publik yang lebih mudah dan nyaman untuk diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Bengkayang. Untuk mencapai visi SDM Mantap, strategi yang diemban Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan lebih meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan melalui: penyempurnaan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan (gedung sekolah, laboratorium, dan perpustakaan), meningkatkan mutu tenaga pendidik dengan cara meningkatkan standar kompetensi guru atau pengajar, pemerataan tenaga pendidik pada wilayah terpencil ditopang oleh infrastruktur yang mantap yang berimplikasi pada kemajuan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Kata "**MANTAP**" yang tertera dalam slogan tersebut memiliki makna sebagai kata kunci yang akan diwujudkan dengan kondisi atau capaian sebagai berikut:

Maju dalam 3 Aspek, Yaitu meliputi aspek pendidikan dan kesehatan, Aspek Ekonomi (ekonomi Kerakyatan yang Handal, Kreatif Dan Mandiri) dan Infrastruktur dasar yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan.

Adil dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi, Insfrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Nasionalis dan berakhlak mulia serta berkomitmen menjaga keharmonisan dan mewujudkan masyarakat Bengkayang yang berbudaya.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Terdepan dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata, terdepan dalam Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan terdepan dalam mewujudkan desa mandiri serta terdepan dalam mengawal terwujudnya pemerintahan yang terbuka, bersih, dan bebas korupsi, serta terdepan dalam pelayanan publik yang lebih mudah dan nyaman untuk diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bengkayang.

Amanah dalam mengemban tugas bersih, tegas, efektif, dan efisien.

Peduli dalam 2 aspek yaitu kepedulian Pemerintah kepada masyarakat dan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Kata "**GEMILANG**" dalam slogan tersebut memiliki makna yang mendalam dan luas. "Gemilang" mencerminkan kecemerlangan dan keunggulan yang dimiliki oleh Masyarakat Kabupaten Bengkayang dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik di tingkat lokal maupun nasional. Istilah ini menggambarkan bagaimana masyarakat setempat tidak hanya berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap citra dan reputasi daerah serta negara.

Makna "Gemilang" juga menyoroti kesungguhan dan kegigihan yang ditunjukkan oleh warga Kabupaten Bengkayang. Ini adalah gambaran dari tekad dan dedikasi mereka dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Kesungguhan ini tidak hanya terbatas pada upaya individu, tetapi juga merupakan manifestasi dari semangat kolektif yang mendorong kemajuan dan inovasi.

Selain itu, "Gemilang" mencerminkan kesanggupan masyarakat untuk terus berkembang dan beradaptasi dalam menghadapi perubahan zaman. Mereka menunjukkan kemampuan untuk memajukan diri dan daerah mereka dengan cara yang kreatif dan produktif, serta berperan



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

aktif dalam memajukan citra positif Kabupaten Bengkayang di mata masyarakat nasional dan internasional.

Dengan demikian, penggunaan kata "Gemilang" dalam slogan ini menegaskan komitmen masyarakat Kabupaten Bengkayang untuk mencapai puncak kecemerlangan melalui kerja keras, dedikasi, dan semangat yang tak pernah padam, yang pada akhirnya memberikan dampak positif bagi daerah dan negara secara keseluruhan.

Infrastruktur adalah faktor penting dalam pembangunan suatu daerah karena merupakan elemen pendukung bagi seluruh sektor pembangunan suatu daerah. Peran penting infrastruktur adalah sebagai penentu dalam keberhasilan pemerataan pembangunan yang berkeadilan bagi kesejahteraan masyarakat. Misi bupati terpilih berslogan "MANTAP", dimana M adalah Maju untuk infrastruktur dasar adalah pemerataan dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan. Meningkatnya aksesibilitas didukung oleh meningkatnya kinerja infrastruktur transportasi menjadikan pelayanan dasar telah dirasakan oleh seluruh masyarakat. Aksesibilitas tersebut memberikan dampak positif bagi efektif dan efisiennya sektor usaha masyarakat. Selain terhadap sektor usaha masyarakat, aksesibilitas yang meningkat juga akan mempengaruhi optimalitas dari pelayanan pendidikan dan terlebih pelayanan kesehatan.

Untuk permasalahan infrastruktur yang menjadi kewenangan bidang perhubungan adalah terdapat tiga kecamatan dimana angkutan umum tidak beroperasi setiap hari, yaitu Kecamatan Lembah Bawang, Kecamatan Tujuh Belas dan Kecamatan Siding. Dengan data jarak kecamatan-kecamatan tersebut ke ibukota kabupaten berturut-turut 57,39 km; 61,60 km; dan 103,68 km adalah hal yang sangat perlu diperhatikan mengenai pelayanan angkutan umum ini. Ketiadaan angkutan umum menyebabkan masyarakat menggunakan kendaraan pribadi, dimana tidak semua pengguna kendaraan adalah pengguna yang cakap/terampil. Hal ini dapat berdampak terhadap potensi

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

terjadinya kecelakaan di Kabupaten Bengkayang. Terdapat kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana yang disebutkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 pasal 139 ayat 3 dan 4.

Untuk di bidang pelayaran, Kabupaten Bengkayang memiliki Pulau Lemukutan yang merupakan salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan. Moda transportasi utama yang bisa mengangkut penumpang ke pulau Lemukutan adalah kapal, dan pada saat ini sedang dalam proses perizinan berlayar untuk kapal-kapal yang beroperasi. Pada saat ini, pemilik kapal-kapal yang beroperasi diwajibkan untuk melengkapi alat keselamatan berlayar sesuai standar yang ada. Untuk melakukan pengembangan prasarana transportasi, perlu adanya perencanaan dan pembangunan pelabuhan pengumpan sekunder antar pulau-pulau kecil diantaranya pulau Lemukutan. Alur pelayaran ini merupakan alur pelayaran eksisting yang meliputi: pelabuhan Teluk Suak - Pulau Kabung - Pulau Penata Kecil - Pulau Penata Besar - Pulau Lemukutan - Pulau Randayan - Selat Laut Natuna.

Berdasarkan kondisi, analisis dan prediksi kondisi umum Kabupaten Bengkayang dengan mempertimbangkan proyeksi peluang, ancaman, permasalahan, dan keberhasilan yang dihadapi dalam 5 tahun mendatang, maka Visi pembangunan Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2029 adalah:

**“KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA
DAN BERKELANJUTAN”**

Makna filosofi dan pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Maju, Bengkayang sebagai daerah yang maju di sisi ekonomi dan sisi sosial diartikan sebagai Bengkayang daerah yang maju di sisi ekonomi

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

dan sisi sosial. Dari ekonomi Bengkayang dapat menumbuhkan perekonomian, sektor industri dan jasa berkembang serta tingkat pendapatan meningkat. Dari sisi sosial dapat dilihat dari kualitas SDM meningkat, pendidikan semakin tinggi, derajat kesehatan semakin membaik, angka harapan hidup tinggi, dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Selanjutnya masyarakat yang diliputi kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri dan berwawasan ke depan yang luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya teknologi, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan ruang. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Bengkayang untuk kurun waktu 2025-2029 adalah: *smart governance* (pengelolaan pemerintahan yang cerdas), *smart infrastructure* (pembangunan infrastruktur yang cerdas), *smart technology* (pemanfaatan teknologi yang cerdas), *smart mobility* (penyelenggaraan mobilitas/transportasi yang cerdas), *smart healthcare* (pengelolaan kesehatan lingkungan yang cerdas), *smart energy* (pemanfaatan energi yang cerdas), *smart building* (penataan bangunan tata ruang yang cerdas), dan *smart citizen* (membangun masyarakat yang cerdas). Selain itu, prioritas pembangunan juga diarahkan untuk membuka isolasi desa sangat tertinggal agar dapat memberikan dampak penguatan pada ekonomi lokal menuju desa mandiri.

Mandiri, Bengkayang menjadi daerah dengan Kemandirian diartikan sebagai keadaan daerah yang tercermin pada ketahanan ekonomi, keberdayaan masyarakat yang dilandasi oleh ketahanan dan modal sosial. Kemandirian mencerminkan semangat daerah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan. keadaan daerah yang memiliki kemampuan dan keluluasaan dalam menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya, termasuk dalam hal pemanfaatan potensi sumber



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

daya yang ada di daerah. Oleh karena itu, daerah yang mandiri ditandai oleh meningkatkannya kapasitas fiskal, kualitas aparat, efisiensi dan efektivitas layanan publik, kesadaran hukum masyarakat, dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa. Daerah yang mandiri juga ditandai oleh meningkatnya inisiatif, inovasi, dan kreatifitas rakyat di daerah ini untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam mengatasi permasalahan daerah, sehingga daerah yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah yang lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Sejahtera, Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar diartikan sebagai kondisi masyarakat yang tercermin ketika masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar sandang, papan, dan pangan, fasilitas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta memiliki pendapatan yang memenuhi standar kebutuhan hidup. Kondisi kemakmuran masyarakat Kabupaten Bengkayang yang terlihat pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara optimal, adil dan merata. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkayang untuk kurun waktu 2025-2029 adalah: pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, persentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, angka kelangsungan hidup bayi, angka harapan usia hidup, persentase penduduk miskin, dan rasio penduduk bekerja. Masyarakat Kabupaten Bengkayang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi; (2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

Berkelanjutan, Pembangunan dengan Pengelolaan Lingkungan. "Berkelanjutan, Pembangunan dengan Pengelolaan Lingkungan" diartikan sebagai pendekatan pembangunan yang mengutamakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Bengkayang. Dalam konteks ini, setiap inisiatif pembangunan tidak hanya berfokus pada pencapaian target ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Pendekatan ini berarti bahwa setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan di Bengkayang dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan hidup. Ini mencakup upaya untuk meminimalkan kerusakan lingkungan, menjaga keberagaman hayati, serta memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Melalui perencanaan dan pelaksanaan yang hati-hati, pembangunan di Bengkayang berkomitmen untuk meminimalisir pencemaran dan kerusakan ekosistem, serta menjaga kualitas udara, air, dan tanah. Lebih jauh lagi, prinsip berkelanjutan juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan lingkungan. Masyarakat didorong untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait proyek pembangunan yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitar mereka. Melalui pendidikan dan penyuluhan, masyarakat diberdayakan untuk memahami pentingnya menjaga lingkungan dan berperan serta dalam praktek-praktek ramah lingkungan. Tujuan dari penerapan prinsip ini adalah untuk mencapai tata kehidupan masyarakat yang harmonis, di mana pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan berjalan beriringan. Dengan demikian, Bengkayang tidak hanya membangun infrastruktur dan perekonomian yang kuat tetapi juga menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan berkualitas bagi generasi sekarang dan mendatang.



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Secara keseluruhan, konsep "Berkelanjutan, Pembangunan dengan Pengelolaan Lingkungan" menggambarkan komitmen Kabupaten Bengkayang untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan yang responsif terhadap lingkungan dalam setiap aspek kegiatan pembangunan, guna menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan dan tata kehidupan masyarakat yang seimbang.

Selain Visi Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan juga ditopang Pemerintahan yang bersih dan terbuka”

Pemerintahan yang bersih, diartikan suatu kondisi pemerintahan daerah yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Pemerintahan yang terbuka, diartikan suatu kondisi pemerintahan daerah yang mampu memberikan akses informasi publik yang optimal dan menerapkan sistem pengaduan publik yang baik.

Visi pembangunan Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2029 ini mengarah pada pencapaian tujuan dari dibentuknya pemerintahan Kabupaten Bengkayang. Visi pembangunan tersebut harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat kemajuan, kemandirian, kesejahteraan, dan berkelanjutan yang ingin dicapai.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Keterkaitan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJMD Kabupaten Bengkayang

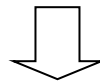
Visi Pembangunan Nasional 2025-2029:

"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"



Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat 2025-2029:

"Terwujudnya Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan"



Visi Pembangunan Kabupaten Bengkayang 2025-2029:

"Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan"

2.1.6 Misi

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Bengkayang tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak dan berbudaya.

Misi ini dimaksudkan bahwa mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak, dan berbudaya sebagai karakter SDM berkualitas merupakan syarat mutlak tercapainya

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Visi Kabupaten Bengkayang. Keberhasilan pencapaian misi ini dengan ditandai dengan adanya peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai budaya dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, dan akuntabel

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan transparan, responsif, efektif serta akuntabel dengan cara peningkatan profesional dan kualitas birokrasi yang sejalan prinsip reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha.

3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur

Misi ini dimaksudkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman untuk menggerakkan perekonomian daerah, menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan inklusif

Misi ini dimaksudkan untuk penguatan fundamental perekonomian yang didukung prasarana ekonomi serta peningkatan akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha, sehingga perekonomian daerah semakin kuat, serta ekonomi kerakyatan semakin tumbuh dan berkembang. Disisi lainnya, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan dilanjutkan secara konsisten dengan penguatan sinergitas program.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

5. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan kondusifitas wilayah

Misi ini dimaksudkan bahwa proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung sumber daya serta lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan demi terciptanya kondusifitas wilayah.

Misi RPJMD Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2025-2029, sehingga terdapat hubungan yang kuat sebagaimana digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.13 Hubungan Misi Daerah dan Pusat

Misi Pembangunan RPJMN 2025-2029 (Asta Cita Ketiga)	Misi Pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2025-2029	Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Bengkayang 2025-2029
Misi 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Misi 1: Mewujudkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur Kalimantan Barat yang adil dan berkelanjutan.	Misi 3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar dan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat.

Sumber: Dishub Kab. Bengkayang Tahun 2025

Sesuai tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang dalam Renstra 2025-2029 ini diamanatkan untuk melaksanakan misi RPJMD Tahun 2025-



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

2029 yaitu misi ke-3 berisi “Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar dan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat”. Fokus pada peningkatan infrastruktur dasar meliputi pembangunan dan perbaikan fasilitas penting seperti jalan, jembatan, sistem drainase, dan layanan publik lainnya yang mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat. Kualitas infrastruktur yang baik akan mempermudah akses dan mobilitas serta meningkatkan standar hidup. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana akan memastikan bahwa sumber daya seperti tanah, air, dan mineral dimanfaatkan secara efisien dan berkelanjutan. Program pengelolaan sumber daya yang berbasis pada teknologi dan praktik terbaik akan meningkatkan produktivitas dan mengurangi kerugian. Dengan pendekatan ini, diharapkan ada peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan hasil pertanian, perikanan, dan sektor lainnya yang bergantung pada pengelolaan sumber daya yang efektif.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

2.3 Isu strategis

Berdasarkan telaahan kebijakan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat; serta Renstra Kementerian Perhubungan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut.

1. Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan di bidang Perhubungan Darat dan laut;
2. Angka Kecelakaan yang meningkat setiap tahunnya;
3. Belum optimalnya aksesibilitas dan konektivitas Perhubungan; dan
4. Optimalisasi kontribusi di bidang Perhubungan dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah.

2.3.1 Telaah Renstra Kementerian /Lembaga

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dilakukan sebagai bagian dari upaya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah sejalan dengan prioritas nasional serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan secara makro. Melalui telaahan ini, perangkat daerah dapat mengidentifikasi keterkaitan program sektoral pusat yang relevan, sekaligus merumuskan langkah kolaboratif untuk memperkuat implementasi kebijakan di tingkat daerah. Dinas Perhubungan berkaitan dengan Kementerian Perhubungan. Telaah terhadap Renstra Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

Tabel 2. 14 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Mewujudkan layanan transportasi yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana & prasarana transportasi publik di daerah masih terbatas dan belum memenuhi standar pelayanan minimum. - Keselamatan lalu lintas rendah akibat minimnya pengawasan & kesadaran pengguna jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan regulasi nasional & daerah (UU, Perda, RPJMD). - Potensi kerja sama dengan Polri, Jasa Raharja, dan swasta. 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran daerah untuk pembangunan/rehabilitasi sarana. - Kapasitas SDM Dishub masih terbatas dalam pengawasan dan manajemen transportasi.
Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pengembangan jaringan transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya akses transportasi ke wilayah terpencil/perbatasan. - Keterbatasan armada angkutan umum, trayek tidak merata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan program pusat (DAK, hibah, infrastruktur strategis). - Potensi kerja sama lintas kabupaten/provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi geografis dan topografi daerah yang menantang. - Ketergantungan pada dana transfer pusat.
Penguatan transportasi berkelanjutan yang ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya penggunaan transportasi ramah lingkungan. - Belum ada sistem angkutan massal berbasis energi bersih di daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kebijakan nasional green transportation. - Potensi integrasi dengan kebijakan lingkungan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya investasi tinggi untuk infrastruktur ramah lingkungan. - Kesadaran masyarakat masih rendah.
Digitalisasi layanan transportasi dan peningkatan tata kelola	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem manajemen transportasi di Dishub masih manual. - Rendahnya literasi digital di kalangan pegawai dan operator angkutan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan program SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). - Infrastruktur TIK mulai berkembang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM IT. - Kesenjangan akses internet di beberapa wilayah.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Peningkatan keselamatan dan ketertiban lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> - Angka kecelakaan lalu lintas masih tinggi. - Koordinasi lintas sektor dalam pengawasan lalu lintas belum optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan kepolisian, Jasa Raharja, dan komunitas. - Adanya program nasional keselamatan jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Disiplin masyarakat masih rendah. - Sarana penunjang keselamatan (rambu, marka, APILL) masih kurang.
Penguatan peran transportasi dalam mendukung ekonomi daerah dan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Akses transportasi ke kawasan wisata belum memadai. - Kurangnya integrasi antara transportasi dengan sektor pariwisata dan perdagangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi pariwisata daerah cukup besar. - Dukungan program pusat untuk konektivitas destinasi wisata prioritas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan infrastruktur pendukung di daerah. - Belum ada model bisnis transportasi yang menarik investor/swasta

Sumber: Dishub Kab. Bengkayang Tahun 2025

2.3.2 Telaah Renstra Provinsi

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Provinsi dilakukan untuk memastikan keselarasan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi. Telaahan ini menjadi dasar penting dalam menyusun perencanaan yang terintegrasi dan sinergis, khususnya dalam hal dukungan program lintaswilayah, pembinaan urusan pemerintahan, serta pencapaian target pembangunan daerah yang bersifat makro. Melalui proses ini, perangkat daerah dapat merumuskan strategi yang responsif terhadap prioritas pembangunan provinsi sekaligus memperkuat koordinasi antarlevel pemerintahan. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang berkaitan dengan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat. Telaah terhadap Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

Tabel 2. 15 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya Konektivitas antar wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Konektivitas antar kecamatan di Bengkayang belum merata, terutama ke wilayah perbatasan. - Akses ke kawasan wisata dan desa terpencil masih sulit dijangkau. - Angkutan umum trayek perdesaan sangat terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan program provinsi & pusat untuk perbatasan dan hinterland. - Keberadaan PLBN Jagoi Babang sebagai simpul konektivitas regional. - Potensi pariwisata dan perdagangan lintas negara mendorong kebutuhan konektivitas. 	<ul style="list-style-type: none"> -Topografi perbukitan, biaya pembangunan jalan tinggi. -Ketergantungan pada APBD Provinsi dan APBN. -Armada angkutan umum daerah minim.
V/C Ratio di Jalan Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - Beberapa ruas jalan provinsi yang melewati Bengkayang (misalnya Bengkayang–Sambas, Bengkayang–Singkawang) mulai padat terutama di pusat kota/pasar. - Parkir liar di tepi jalan memperparah kemacetan. - Belum ada terminal representatif dan manajemen lalu lintas terpadu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya jaringan jalan provinsi yang strategis di Bengkayang. - Kebijakan provinsi mendukung pengurangan kemacetan melalui pembangunan jalan baru/pelebaran. - Dukungan regulasi (Perda LLAJ, Perhubungan Darat). 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran kabupaten untuk pembangunan fasilitas lalu lintas (terminal, kantong parkir, rambu). - Disiplin masyarakat rendah (parkir sembarangan, kepadatan pasar). - Keterbatasan SDM pengawasan dan penegakan aturan lalu lintas.

Sumber: Dishub Kab. Bengkayang Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

2.3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkayang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 -2034 Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 16 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang ditinjau dari Implikasi RTRW

No	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Pengembangan pusat kegiatan wilayah (PKW, PKL, pusat pelayanan kecamatan)	<ul style="list-style-type: none"> - Arah RTRW jelas menentukan pusat pertumbuhan. - Tuntutan layanan transportasi ke pusat pelayanan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana transportasi umum belum berkembang. - Anggaran pembangunan simpul transportasi terbatas.
2.	Pengembangan jaringan jalan arteri & kolektor ke perbatasan dan antar kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Ada dukungan provinsi & pusat untuk konektivitas perbatasan. - Potensi perdagangan lintas batas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Topografi sulit (perbukitan, hutan). - Fasilitas keselamatan jalan terbatas.
3.	Kawasan strategis ekonomi (pertanian, perkebunan, pariwisata)	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ditetapkan kawasan strategis dalam RTRW. - Dukungan pengembangan wisata & ekonomi lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan akses masih terbatas & kualitas buruk. - Minimnya transportasi umum ke kawasan strategis.
4.	Kawasan perkotaan & permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan kota Bengkayang & kecamatan strategis cepat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan kendaraan lebih cepat dari pembangunan jalan.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

		- Kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan transportasi meningkat.	- Belum tersedia transportasi publik massal.
5.	Kawasan lindung & konservasi	- Ada dukungan provinsi & nasional terkait transportasi berkelanjutan. - Isu lingkungan makin mendapat perhatian.	- Kesadaran masyarakat rendah terhadap transportasi ramah lingkungan. - Belum ada alternatif moda ramah lingkungan di daerah.

Sumber: Dishub Kab. Bengkayang Tahun 2025

2.3.4 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, isu KLHS RPJMD yang relevan dengan tugas pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang sebagai berikut:

- a) Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah
- b) Ketimpangan Sosial Ekonomi

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

Tabel 2.17 Keterkaitan Isu Strategis Perangkat Daerah dengan Potensi Daerah, KLHS, dan Isu Lingkungan Dinamis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah penduduk yang semakin meningkat	Belum terpenuhinya terminal tipe c sesuai standar untuk angkutan umum di Kabupaten Bengkayang	Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah	Dampak Transportasi Terhadap Emisi Gas Rumah Kaca	Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca Akibat Transportasi	Emisi Gas Buang	Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan di bidang Perhubungan Darat dan Laut
Meningkatnya Pengunjung Pariwisata ke Pulau-Pulau	Masih kurangnya Sarana Prasarana Pelayanan di Dermaga/Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kabupaten Bengkayang		Perubahan Iklim	Pengelolaan Sampah dan Limbah yang Terkait Dengan Infrastruktur Perhubungan	Polusi Udara	
Meningkatnya Jaringan Jalan	Kurang tersedianya pembangunan dan pemeliharaan perlengkapan serta prasarana jalan di Kabupaten Bengkayang	Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah	peningkatan efisiensi dan keberlanjutan transportasi publik dan pribadi	Pemanfaatan Transportasi Publik yang Ramah Lingkungan	Penggunaan Bahan Bakar	Angka kecelakaan yang meningkat setiap tahunnya
Semakin tingginya Kepadatan Arus Lalu Lintas	Kurang optimalnya pengaturan dan pengamanan lalu lintas di Kabupaten Bengkayang	Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah	pengelolaan limbah dan sampah dari transportasi	Perubahan Iklim dan Dampaknya Terhadap Infrastruktur Perhubungan	Dampak Infrastruktur Transportasi Terhadap Ekosistem dan Konservasi Lingkungan.	Belum optimalnya aksesibilitas dan konektivitas Perhubungan
Bertambahnya Jumlah Kendaraan	Kurang optimalnya kontribusi retribusi di bidang Perhubungan terhadap PAD Kabupaten Bengkayang	Ketimpangan Sosial Ekonomi	Dampak Transportasi Terhadap Emisi Gas Rumah Kaca	Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca Akibat Transportasi	Emisi Gas Buang	Optimalisasi kontribusi di bidang Perhubungan dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah
Ketersediaan Sumber Daya Manusia	Belum tercukupinya SDM bidang Perhubungan yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang Perhubungan Darat		Perang dagang antara AS dan Tiongkok mengganggu rantai pasok global	Kesenjangan digital di wilayah-wilayah yang belum siap infrastruktur dan SDM-nya.	Ketimpangan kualitas tenaga kerja antar daerah	

Sumber: Dishub Kab. Bengkayang Tahun 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai. Tujuan ditetapkan guna menjabarkan atau mengimplementasikan dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan Renstra mengacu pada pernyataan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang melaksanakan misi ke-3 yaitu:

Misi ke-3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar dan optimalisasi pengelolaan dan kemanfaatan sumber daya alam dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat.

Fokus pada peningkatan infrastruktur dasar meliputi pembangunan dan perbaikan fasilitas penting seperti jalan, jembatan, sistem drainase, dan layanan publik lainnya yang mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat. Kualitas infrastruktur yang baik akan mempermudah akses dan mobilitas serta meningkatkan standar hidup. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana akan memastikan bahwa sumber daya seperti tanah, air, dan mineral dimanfaatkan secara efisien dan berkelanjutan. Program pengelolaan sumber daya yang berbasis pada teknologi dan praktik terbaik akan meningkatkan produktivitas dan mengurangi kerugian. Dengan pendekatan ini, diharapkan ada peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan hasil pertanian, perikanan, dan sektor lainnya yang bergantung pada pengelolaan sumber daya yang efektif.



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang menetapkan tujuan yaitu **“Terwujudnya Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman, dan Terjangkau”**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Artinya tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain berhasil. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan pencapaian misi Dinas Perhubungan yaitu:

- a. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas;
- b. Meningkatnya keamanan dan keselamatan transportasi; dan
- c. Meningkatnya kinerja perangkat daerah.

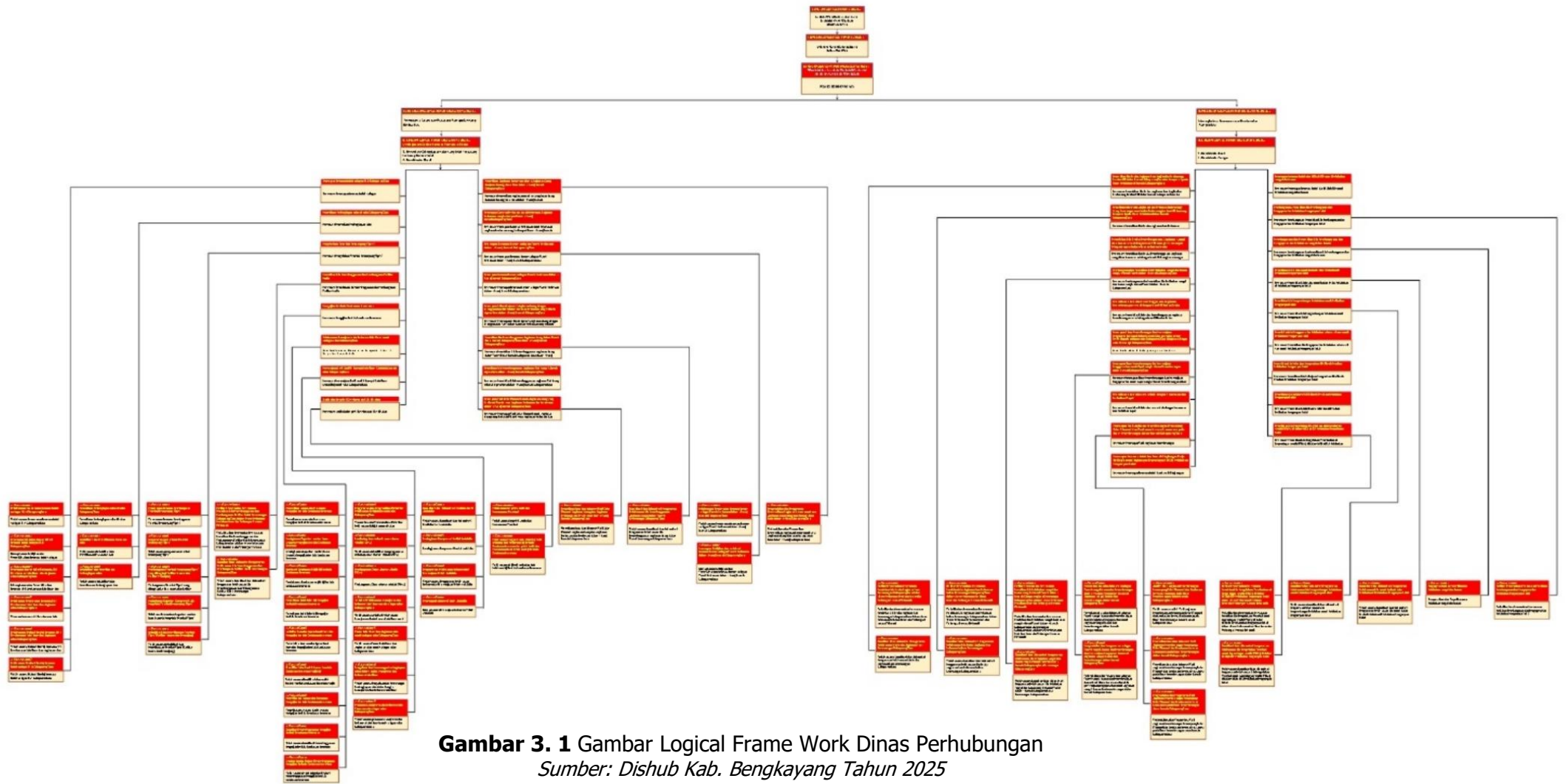
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Tabel 3.1 Tabel Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tahun					Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terwujudnya Layanan Transportasi Yang Nyaman, Aman, Dan Terjangkau		RASIO KONEKTIVITAS	82.5	82.5	83	83.5	84	84.25	
Peningkatan Kualitas layanan Transportasi		Tersedianya Sarana Dan Prasarana Transportasi Yang Berkualitas	Pemasangan Rambu-Rambu	3%	3%	4%	5%	6%	8%	
			Rasio Izin Trayek	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	
			Persentase Pemasangan Penerangan Jalan Umun (PJU)	7,81%	8,62%	9,62%	10,89%	12,54%	14,75%	
			Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	20.502	20.605	20.708	20.811	20.915	21.020	
			Jumlah arus penumpang angkutan Umum	322.076	323.244	324.412	325.580	326.748	327.916	
			Persentase layanan angkutan darat	0,0502%	0,0504%	0,0506%	0,0508%	0,0510%	0,0512%	
			Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis	2	2	2	3	3	3	
Peningkatan Kualitas Pelayanan		Meningkatnya Keamanan Dan Keselamatan Transportasi	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	41%	43%	44%	45%	46%	46%	
			Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	274	277	280	283	286	290	
Akuntabilitas Kinerja		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	64,65	65,86	67,05	68,25	69,45	70,65	

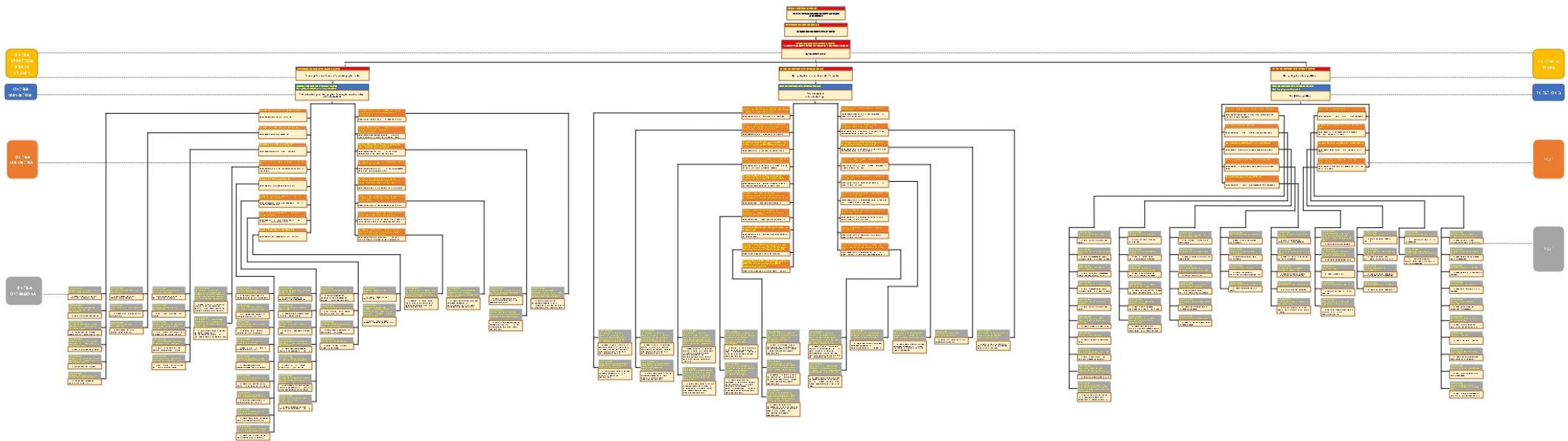
Sumber: Dishub Kab. Bengkayang Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN



Gambar 3. 1 Gambar Logical Frame Work Dinas Perhubungan
Sumber: Dishub Kab. Bengkayang Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN



Gambar 3. 2 Gambar Cascading Dinas Perhubungan
Sumber: Dishub Kab. Bengkulu Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

3.2 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan

Strategi merupakan pemikiran konseptual, analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Berbagai strategi pembangunan yang ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan diarahkan pada kebijakan untuk mewujudkan visi RPJMD 2025-2029.

Rumusan tahapan-tahapan pembangunan sebagai pijakan rencana pembangunan tahunan menjadi pedoman dan arahan yang tegas dan jelas guna menentukan prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkayang. Adapun tahapan-tahapan pembangunan tahunan dalam RPJMD 2025-2029 diarahkan pada:

1. Tahap 1 (Tahun 2026)

Pada tahap awal pelaksanaan strategi, fokus diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar keselamatan dan perlengkapan jalan, serta penguatan kapasitas kelembagaan internal. Kegiatan utama meliputi:

a. Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Dilaksanakan di titik-titik strategis dan rawan kecelakaan guna meningkatkan keselamatan dan ketertiban pengguna jalan, serta mendukung kelancaran arus lalu lintas.

b. Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)

PJU dipasang di ruas-ruas jalan yang belum terlayani penerangan, terutama di kawasan permukiman dan titik akses publik, untuk menurunkan risiko kecelakaan dan meningkatkan rasa aman masyarakat pada malam hari.

c. Survey Perlengkapan Jalan

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

Dilakukan untuk memetakan kondisi eksisting perlengkapan jalan, mencakup marka jalan, guardrail, cermin tikungan, dan rambu. Data ini menjadi dasar perencanaan dan intervensi pada tahap-tahap selanjutnya.

d. Peningkatan Kompetensi SDM UPT PKB

Diselenggarakan pelatihan teknis dan administratif bagi pegawai UPT PKB, khususnya dalam bidang pengujian kendaraan bermotor, pelayanan publik berbasis digital, serta pemahaman regulasi terbaru.

e. Pemasangan Traffic Light

Traffic light atau lampu lalu lintas adalah perangkat sinyal elektronik yang digunakan untuk mengatur arus lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki di persimpangan jalan, zebra cross, atau titik-titik rawan kecelakaan. Perangkat ini menggunakan kombinasi warna (merah, kuning, hijau) yang telah distandarkan secara internasional.

f. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelabuhan Pengumpan Lokal Teluk Suak

Merumuskan rencana teknis, operasional, dan administratif pembangunan pelabuhan pengumpan yang optimal, aman, dan berkelanjutan.

2. Tahap 2 (Tahun 2027)

Memasuki tahun kedua, strategi diarahkan pada peningkatan pelayanan infrastruktur transportasi dan perencanaan terminal. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

a. Lanjutan Pemasangan Rambu-Rambu dan PJU

Wilayah yang belum tercakup pada tahun sebelumnya menjadi sasaran intervensi, termasuk penggantian atau pemeliharaan rambu dan PJU yang rusak atau tidak sesuai standar.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

b. Penyusunan Perencanaan Terminal Tipe C

Dilakukan studi kelayakan, analisis kebutuhan transportasi, dan penyusunan dokumen teknis perencanaan pembangunan Terminal Tipe C sebagai simpul transportasi lokal.

c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung UPT PKB

Renovasi dan penambahan fasilitas dilakukan untuk mendukung kelancaran operasional dan kenyamanan pengguna layanan, seperti ruang tunggu, sistem antrean elektronik, serta alat uji kendaraan bermotor.

3. Tahap 3 (Tahun 2028)

Pada tahun ketiga, strategi memasuki fase implementasi fisik infrastruktur transportasi, khususnya terminal.

a. Pembangunan Terminal Tipe C di Kecamatan Bengkayang

Merupakan langkah konkret dari perencanaan sebelumnya. Pembangunan mencakup gedung terminal, lahan parkir, fasilitas pendukung seperti ruang tunggu, loket tiket, dan sanitasi publik.

b. Pemasangan Rambu-Rambu dan PJU (lanjutan)

Tetap dilakukan untuk meningkatkan cakupan dan konsistensi penyediaan perlengkapan jalan di seluruh kecamatan.

c. Peningkatan Kompetensi SDM UPT PKB

Fokus pada pelatihan lanjutan dalam pengoperasian alat uji kendaraan modern, pelayanan ramah disabilitas, dan pengelolaan sistem informasi berbasis digital.

4. Tahap 4 (Tahun 2029)

Strategi pada tahun keempat berfokus pada perencanaan terminal lanjutan dan penguatan kapasitas infrastruktur kelembagaan.

a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung UPT PKB



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Melanjutkan proses revitalisasi fasilitas fisik, termasuk pengadaan alat uji tambahan dan sistem pengawasan digital (CCTV, database pengujian).

b. Pemasangan Rambu-Rambu dan PJU (berkelanjutan)

Penyesuaian dilakukan sesuai dengan hasil evaluasi kebutuhan dan efektivitas pemasangan sebelumnya.

5. Tahap 5 (Tahun 2030)

Tahun terakhir strategi difokuskan pada penyelesaian pembangunan terminal dan penilaian kembali kelengkapan sarana jalan.

a. Pemasangan Rambu-Rambu dan PJU (penuntasan)

Melengkapi titik-titik akhir wilayah intervensi, serta memasang rambu-rambu tematik sesuai karakteristik kawasan (misalnya kawasan sekolah, pasar, atau tempat ibadah).

b. Survey Perlengkapan Jalan (lanjutan)

Survey ini bertujuan mengevaluasi dampak intervensi lima tahun dan menyusun rekomendasi perbaikan untuk perencanaan jangka menengah berikutnya.

Rangkaian strategi dan tahapan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel dibawah ini.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

Tabel 3.2 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra

Visi	:	TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BENGKAYANG YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN			
Misi 3	:	Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur			
Tujuan		Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
TERWUJUDNYA LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN, DAN TERJANGKAU	1.	TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI YANG BERKUALITAS	1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan	1. Penyediaan rambu, marka jalan, lampu penerangan, dan fasilitas penyebrang 2. Perbaikan titik rawan kecelakaan
			2.	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan transportasi publik	1. Peningkatan kualitas dan konektivitas jalan 2. Perencanaan dan Pembangunan terminal, halte dan dermaga
	2.	MENINGKATNYA KEAMANAN DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI	1.	Modernisasi uji kendaraan dan izin operasional	1. Digitalisasi uji KIR 2. Integrasi data kendaraan antar daerah
			2.	Edukasi dan sosialisasi keselamatan transportasi	1. Kampanye Pelopor Keselamatan Jalan 2. Sosialisasi Kewajiban untuk melaksanakan Uji KIR
	3.	MENINGKATNYA KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.	Penguatan sistem pelaporan dan monitoring berbasis kinerja	1. Penggunaan aplikasi e-kinerja dan dashboard pemantauan real-time 2. Penilaian berkala indikator kinerja perangkat daerah
			2.	Peningkatan kapasitas dan integritas ASN bidang transportasi	1. Pelatihan teknis dan manajerial ASN 2. Sistem reward and punishment berbasis capaian kinerja

Sumber: Dishub Kab. Bengkayang Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

Tabel 3.3 Penahapan Rencana Strategis

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1. Pemasangan Rambu-Rambu 2. Pemasangan PJU 3. Survey Perlengkapan Jalan 4. Peningkatan Kompetensi SDM UPT PKB 5. Pemasangan Trafiic Light 6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelabuhan Pengumpan Lokal Teluk Suak	1. Pemasangan Rambu-Rambu 2. Pemasangan PJU 3. Penyusunan Perencanaan Terminal Tipe C 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung UPT PKB	1. Pemasangan Rambu-Rambu 2. Pemasangan PJU 3. Pembangunan Terminal Tipe C di Kecamatan Bengkayang 4. Peningkatan Kompetensi SDM UPT PKB	1. Pemasangan Rambu-Rambu 2. Pemasangan PJU 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung UPT PKB	1. Pemasangan Rambu-Rambu 2. Pemasangan PJU 3. Survey Perlengkapan Jalan 4. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)

Sumber: Dishub Kab. Bengkayang Tahun 2025



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan

Arah kebijakan yang dibuat akan menjadi penuntun terhadap program-program indikatif yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2029 merupakan tahapan keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkayang tahun 2005-2025. Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan membutuhkan arah kebijakan yang selaras agar pencapaian pembangunan selama 5 tahun dapat berjalan efektif dan efisien.

Rangkaian arah kebijakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel dibawah ini.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Rencana Strategis	Keterangan
1	2	3	4	6
	Peningkatan Kualitas layanan Transportasi	Mengembangkan Sistem Transportasi Terintegrasi	Penyediaan rambu, marka jalan, lampu penerangan, dan fasilitas penyebrang	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan		Perbaikan titik rawan kecelakaan	
			Peningkatan kualitas dan konektivitas jalan	
			Perencanaan dan Pembangunan terminal, halte dan dermaga	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan	Meningkatkan perlindungan keanekaragaman hayati (termasuk ekosistem hingga spesies) melalui penerapan kajian dokumen lingkungan hidup seperti RPPLH dan KLHS	Digitalisasi uji KIR	
			Integrasi data kendaraan antar daerah	
			Kampanye Pelopor Keselamatan Jalan	
	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan perlindungan keanekaragaman hayati (termasuk ekosistem hingga spesies) melalui penerapan kajian dokumen lingkungan hidup seperti RPPLH dan KLHS	Sosialisasi Kewajiban untuk melaksanakan Uji KIR	
			Penggunaan aplikasi e-kinerja dan dashboard pemantauan real-time	
			Penilaian berkala indikator kinerja perangkat daerah	
			Pelatihan teknis dan manajerial ASN	
			Sistem reward and punishment berbasis capaian kinerja	

Sumber: Dishub Kab. Bengkayang Tahun 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Visi Kabupaten Bengkayang adalah “Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan”. Visi ini dilaksanakan dengan 7 (tujuh) misi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran. Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi disusun program-program pembangunan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang mengemban tugas untuk melaksanakan misi ke-3 sesuai program yang ada di Renstra ini merupakan program pendukung dalam pencapaian kinerja Dinas Perhubungan selama 5 (lima) tahun yaitu periode 2025-2029, dirumuskan sebagai berikut:

Misi 3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar dan optimalisasi pengelolaan dan kemanfaatan sumber daya alam dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat didukung oleh program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); dan
3. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini merupakan penjabaran dari program tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029. Keterkaitan antara kebijakan dengan program disajikan dalam tabel berikut:

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Tabel 4. 1 Tabel Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Peningkatan Kualitas layanan transportasi	Terwujudnya Layanan Transportasi Yang Nyaman, Aman, dan Terjangkau				Rasio Konektivitas		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi Yang Berkualitas			1. Pemasangan Rambu-Rambu 2. Rasio Izin Trayek 3. Persentase Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) 4. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum 5. Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun 6. Jumlah arus penumpang angkutan Umum 7. Persentase layanan angkutan darat 8. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat		1. Konektivitas Darat 2. Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Jaringan LLAJ, Sosialisasi/Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Kab/Kota	Jumlah dokumen /laporan Sosialisasi/pengendalian rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		
				Dokumen	Terlaksanannya penyusunan Rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
				Dokumen	Ditetapkannya kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
				Dokumen	Terlaksanannya Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	
				Dokumen	Tersusunya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output		Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
				Dokumen	Terlaksanannya Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	
				Laporan	Terlaksanannya Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
				Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas keselamatan transportasi Darat	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
				Unit	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
				Unit	Tersediaanya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
				Unit	Terehabilitasi dan terpeliharanya Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output		Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
				Unit	Terehabilitasi dan terpeliharanya Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
				Jumlah terminal penumpang tipe C yang dikelola		Persentase ketersediaan Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe C	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
				Dokumen	Terlaksanannya penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	
				Dokumen	Terlaksanannya Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	
				Unit	Tersedianya Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
				Unit	Tersedianya sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C	Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital	Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				Unit	Terbangunnya Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	
				Orang	Meningkatnya Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	
				Unit	Terehabilitasi dan terpeliharanya Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
				Jumlah Ijin dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang diterbitkan		Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas keselamatan transportasi Darat	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				Dokumen	Terlaksananya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Laporan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas keselamatan transportasi Darat	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				Laporan	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
				Dokumen	Terlaksananya Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
				Laporan	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan	Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	
				Unit	Terlaksananya pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	
				Laporan	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi	Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	
				Laporan	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output		Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
				Orang	Terlaksananya dan meningkatnya Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya	Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
				Unit	Terlaksananya pembangunan Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	
				Unit	Terlaksananya Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	
				Dokumen	Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
				Laporan	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
				Dokumen	Tersedianya Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output		Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
				Laporan	Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota yang disetujui		Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas keselamatan transportasi Darat	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
				Laporan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	
				Orang	Terlaksananya penilaian Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output		Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
				Laporan	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	
				Dokumen	Tersedianya Dokumen Persetujuan Teknis Andalalin yang ditetapkan	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	
				Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan yang dilaksanakan		Persentase jumlah Dokumen/Laporan Audit Keselamatan Jalan di jalan	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
				Laporan	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	
				Laporan	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				Laporan	Terlaksananya Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C	
				Laporan	Terlaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
				Orang	Terlaksananya Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
				Laporan	Terlaksananya pengawasan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persentase Jumlah Angkutan Umum yang Laik Pakai dan Trayek yang Tersedia	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Laporan Terkendalinya dan terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
				Unit Tersedianya Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang ditetapkan	Persentase Layanan transportasi Angkutan Jalan	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Dokumen Tersedianya Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Dokumen Terlaksanannya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Persentase Layanan transportasi Angkutan Jalan	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Dokumen Terlaksanannya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Dokumen Terlaksanannya Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Dokumen Terlaksanannya Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Persentase Layanan transportasi Angkutan Jalan	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Dokumen Terlaksananya Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Dokumen Terlaksannannya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Persentase Layanan transportasi Angkutan Jalan	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Dokumen Terlaksananya Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Dokumen Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Dokumen Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Dokumen Terlaksananya Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Persentase Layanan transportasi Angkutan Jalan	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Laporan Terlaksanannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Unit Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Persentase Layanan transportasi Angkutan Jalan	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Unit Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Laporan Terlaksanannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terselenggaranya Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Dokumen Terlaksanannya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Dokumen Terselenggaranya Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Laporan Terkendalinya dan terawasinya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Dokumen Terselenggaranya Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output		Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
				Jumlah Prasarana Transportasi Jalan yang tersedia		Persentase Layanan transportasi Angkutan Jalan	Penyediaan Prasarana Transportasi Jalan	
				Unit	Tersedianya Prasarana Transportasi Terminal, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda yang baik	Jumlah Prasarana Transportasi Terminal, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda yang Tersedia	Penyediaan Prasarana Transportasi Terminal, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	
				Unit	Terselenggaranya Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Jumlah Sistem Manajemen Transportasi Cerdas yang Tersedia	Penyediaan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut			Konektivitas Sungai	Program Pengelolaan Pelayaran	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Persentase Layanan Jaringan transportasi Angkutan Laut.	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	
				Dokumen Terlaksananya Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Laporan Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Dokumen Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Laporan Terlaksanannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha yang diterbitkan	Persentase layanan Jaringan Angkutan Sungai dan Danau	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				Dokumen	<p>Terfasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</p>	<p>Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</p>	<p>Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</p>	
				Laporan	<p>Terlaksanannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Pembangunnya dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintasan	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	
				Dokumen Terfasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Laporan Terlaksanannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha yang diterbitkan	Persentase layanan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintasan	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Dokumen Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Laporan Terlaksanannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Persentase layanan jaringan transportasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan.	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Dokumen Terdatanya Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Laporan Terkendalinya dan terawasinya Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Persentase layanan jaringan transportasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan.	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Dokumen Terdatanya Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				Laporan	Terkendalinya dan terawasinta Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal		Persentase layanan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal	Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	
				Dokumen	Terfasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Laporan Terlaksanannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	
				Jumlah Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Dokumen Teranalisisnya Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				Dokumen	Terdatanya Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Laporan	Terkendali dan terawasinya Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Trayek Lintasan	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				Dokumen	Tersusunnya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	
				Dokumen	Ditetapkannya Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	
				Laporan	Terkendaliannya Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Trayek Lintasan	Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	
				Dokumen Terlaksanannya Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	
				Dokumen Terlaksanannya Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Laporan Terlaksanannya Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	
				Jumlah Pembangunan, Penerbitan Izin dan Jumlah Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Trayek Lintasan	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	
				Dokumen terlaksanannya Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	
				Unit Terlaksanannya Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output		Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
				Unit	Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	
				Laporan	Terlaksananya Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	
				Unit	Terlaksananya Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	
				Jumlah Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		Persentase Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Trayek Lintasan	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
				Dokumen	Terlaksananya Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output		Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
				Unit	terlaksanannya Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	
				Unit	Terlaksanannya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	
				Unit	Terlaksanannya Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	
				Unit	Terlaksanannya Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	
				Orang	Terlaksanannya Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
				Orang	Terselenggaranya Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau	
				Laporan	Terlaksanannya Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output		Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
				Unit	Terlaksanannya fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
				Jumlah Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal		Persentase Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Trayek Lintasan	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	
				Dokumen	Terlaksanannya Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
				Laporan	Terlaksanannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilaksanakan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Trayek Lintasan	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	
				Dokumen Terlaksanannya Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
				Laporan Terlaksanannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	
				Unit Terlaksanannya Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Trayek Lintasan	Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	
				Dokumen Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Laporan Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi yang Dilakukan dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pengumpulan Lokal	Persentase Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Trayek Lintasan	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	
				Dokumen Terlaksanannya Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpulan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpulan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpulan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Laporan Terlaksanannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpulan Lokal yang Dilakukan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	
				Jumlah Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Persentase Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Trayek Lintasan	Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				Dokumen	Terlaksanannya Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Laporan	Terlaksanannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	
					Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Trayek Lintasan	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Dokumen Terlaksanannya Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Laporan Terlaksanannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	
				Jumlah Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Trayek Lintasan	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Laporan Terlaksanannya Pengendalian dan Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota	Pengendalian dan Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota	
				Jumlah Pembangunan, Penerbitan Izin dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Trayek Lintasan	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	
				Laporan Terlaksanannya Pengendalian dan Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota	Pengendalian dan Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota	
Peningkatan Kualitas Pelayanan		Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Transportasi			1. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum 2. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum		

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output		Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat			1. Konektivitas Darat 2. Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
				Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas keselamatan transportasi Darat	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Orang	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Unit	Teregistrasinya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	
				Dokumen	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				Laporan	Terlaksananya Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Laporan	Terlaksananya identifikasi dan analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	
				Unit	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Laporan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Laporan	Ditetapkannya Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Laporan	Ter laksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Akuntabilitas Kinerja		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai AKIP Perangkat Daerah			
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		1. Persentase tingkat pemenuhan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah 2. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
				Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Dokumen	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output		Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
				Dokumen	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Dokumen	Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	
				Dokumen	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Laporan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Laporan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output		Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Orang/bulan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Dokumen	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Dokumen	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Dokumen	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Dokumen	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output		Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
				Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Dokumen	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Dokumen	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Dokumen	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Laporan	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output		Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
				Laporan	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Laporan	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Laporan	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Dokumen	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Unit	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
				Paket	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Dokumen	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output		Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
				Dokumen	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
				Dokumen	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Orang	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	
				Laporan	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	
				Orang	Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Pemindahan Tugas ASN	
				Orang	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Orang	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Orang	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Paket	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Paket	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Paket	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Paket	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Paket	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Dokumen	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Paket	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material
				Laporan	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Laporan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output		Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
				Dokumen	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Dokumen	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Unit	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Unit	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Unit	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Pengadaan Alat Besar	
				Unit	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
				Unit	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Unit	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output		Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
				Unit	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Unit	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Pengadaan Aset Tak Berwujud	
				Unit	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Laporan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Laporan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output		Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
				Laporan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
				Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output		Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
				Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
				Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
				Unit	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Unit	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Unit	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber: Dishub Kab. Bengkayang Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
		Rp 13.907.575. 708	Rp 4.820.839. 858		Rp 6.642.302. 500		Rp 6.821.539. 030		Rp 6.974.629. 678		Rp 7.132.047. 389		Rp 7.293.938. 295	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase tingkat pemenuhan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah (%)	95	100	100		100		100		100		100		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Angka)	87,214	87,35	87,5		87,65		87,78		87,93		88,11		
		Rp 5.911.933.7 08	Rp 4.654.861. 858		Rp 4.720.035. 980		Rp 4.790.836. 519		Rp 4.862.699. 067		Rp 4.935.639. 553		Rp 5.009.674. 146	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 58.762.850	Rp 53.501.850		Rp 95.000.000		Rp 135.000.000		Rp 175.000.000		Rp 215.000.000		Rp 255.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 9.400.000	Rp 25.000.000	2 Dokumen	Rp 10.000.000	2 Dokumen	Rp 10.000.000	2 Dokumen	Rp 10.000.000	2 Dokumen	Rp 10.000.000	2 Dokumen	Rp 10.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 6.106.000	Rp -	2 Dokumen	Rp 10.000.000	2 Dokumen	Rp 15.000.000	2 Dokumen	Rp 20.000.000	2 Dokumen	Rp 25.000.000	2 Dokumen	Rp 30.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp -	Rp -	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 10.000.000	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp 4.358.000	Rp 11.483.000	2 Dokumen	Rp 10.000.000	2 Dokumen	Rp 15.000.000	2 Dokumen	Rp 20.000.000	2 Dokumen	Rp 25.000.000	2 Dokumen	Rp 30.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp -	Rp -	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 15.000.000	1 Dokumen	Rp 20.000.000	1 Dokumen	Rp 25.000.000	1 Dokumen	Rp 30.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 13.898.850	Rp 11.858.850	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 15.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 25.000.000	1 Laporan	Rp 30.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 25.000.000	Rp 5.160.000	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 15.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 25.000.000	1 Laporan	Rp 30.000.000	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Rp -	Rp -	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 15.000.000	1 Dokumen	Rp 20.000.000	1 Dokumen	Rp 25.000.000	1 Dokumen	Rp 30.000.000	
Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Rp -	Rp -	1 Substansi	Rp 5.000.000	1 Substansi	Rp 10.000.000	1 Substansi	Rp 15.000.000	1 Substansi	Rp 20.000.000	1 Substansi	Rp 25.000.000	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Rp -	Rp -	1 Berita Acara	Rp 10.000.000	1 Berita Acara	Rp 15.000.000	1 Berita Acara	Rp 20.000.000	1 Berita Acara	Rp 25.000.000	1 Berita Acara	Rp 30.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.936.205.838	Rp 3.444.068.884		Rp 3.892.507.980		Rp 3.903.308.519		Rp 3.930.171.067		Rp 3.958.111.553		Rp 3.987.146.146	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.892.211.438	Rp 3.395.243.884	50 Orang/bulan	Rp 3.842.507.980	59 Orang/bulan	Rp 3.847.308.519	60 Orang/bulan	Rp 3.868.171.067	63 Orang/bulan	Rp 3.890.111.553	63 Orang/bulan	Rp 3.913.146.146	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 3.500.000	Rp 17.615.000	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 10.000.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 11.000.000	1 Dokumen	Rp 12.000.000	1 Dokumen	Rp 13.000.000	1 Dokumen	Rp 14.000.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 15.494.400	Rp 11.485.000	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 15.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 25.000.000	1 Laporan	Rp 30.000.000	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Rp 15.000.000	Rp 9.725.000	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 10.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp -	Rp -	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 10.000.000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 29.450.000	Rp 7.855.000		Rp 30.000.000		Rp 30.000.000		Rp 30.000.000		Rp 30.000.000		Rp 30.000.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 5.000.000	Rp 4.800.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 4.450.000	Rp -	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 5.000.000	Rp 3.055.000	1 Laporan	Rp 5.000.000	1 Laporan	Rp 5.000.000	1 Laporan	Rp 5.000.000	1 Laporan	Rp 5.000.000	1 Laporan	Rp 5.000.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 5.000.000	Rp -	1 Laporan	Rp 5.000.000	1 Laporan	Rp 5.000.000	1 Laporan	Rp 5.000.000	1 Laporan	Rp 5.000.000	1 Laporan	Rp 5.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 5.000.000	Rp -	1 Laporan	Rp 5.000.000	1 Laporan	Rp 5.000.000	1 Laporan	Rp 5.000.000	1 Laporan	Rp 5.000.000	1 Laporan	Rp 5.000.000	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 5.000.000	Rp -	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp -	Rp -		Rp 20.000.000		Rp 20.000.000		Rp 20.000.000		Rp 20.000.000		Rp 20.000.000	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Rp -	Rp -	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Rp -	Rp -	1 Laporan	Rp 5.000.000	1 Laporan	Rp 5.000.000	1 Laporan	Rp 5.000.000	1 Laporan	Rp 5.000.000	1 Laporan	Rp 5.000.000	
Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 121.122.000	Rp 28.191.000		Rp 60.000.000		Rp 60.000.000		Rp 60.000.000		Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 50.000.000	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 10.000.000	Rp -	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp -	Rp 7.125.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Rp 39.050.000	Rp -	2 Orang	Rp 20.000.000	2 Orang	Rp 20.000.000	2 Orang	Rp 20.000.000	2 Orang	Rp 20.000.000	2 Orang	Rp 20.000.000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 22.072.000	Rp 21.066.000	50 Orang	Rp 20.000.000	50 Orang	Rp 20.000.000	50 Orang	Rp 20.000.000	50 Orang	Rp 20.000.000	50 Orang	Rp 20.000.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp -	Rp -	2 Orang	Rp 10.000.000	2 Orang	Rp 10.000.000	2 Orang	Rp 10.000.000	2 Orang	Rp 10.000.000	2 Orang	Rp 10.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 309.833.980	Rp 162.291.575		Rp 233.600.000		Rp 233.600.000		Rp 233.600.000		Rp 233.600.000		Rp 233.600.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp 5.200.000	Rp -	10 Paket	Rp 10.000.000	10 Paket	Rp 10.000.000	10 Paket	Rp 10.000.000	10 Paket	Rp 10.000.000	10 Paket	Rp 10.000.000	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp 50.819.500	Rp 46.751.600	1 Paket	Rp 50.000.000	1 Paket	Rp 50.000.000	1 Paket	Rp 50.000.000	1 Paket	Rp 50.000.000	1 Paket	Rp 50.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Rp 14.943.200	Rp -	1 Paket	Rp 10.000.000	1 Paket	Rp 10.000.000	1 Paket	Rp 10.000.000	1 Paket	Rp 10.000.000	1 Paket	Rp 10.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp 47.659.000	Rp 46.630.975	1 Paket	Rp 35.000.000	1 Paket	Rp 35.000.000	1 Paket	Rp 35.000.000	1 Paket	Rp 35.000.000	1 Paket	Rp 35.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rp 66.855.460	Rp 16.970.000	1 Paket	Rp 35.000.000	1 Paket	Rp 35.000.000	1 Paket	Rp 35.000.000	1 Paket	Rp 35.000.000	1 Paket	Rp 35.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Rp -	Rp 4.400.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 12.250.000	Rp 4.520.000	1 Laporan	Rp 5.000.000	1 Laporan	Rp 5.000.000	1 Laporan	Rp 5.000.000	1 Laporan	Rp 5.000.000	1 Laporan	Rp 5.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 78.506.820	Rp 39.419.000	12 Laporan	Rp 50.000.000	12 Laporan	Rp 50.000.000	12 Laporan	Rp 50.000.000	12 Laporan	Rp 50.000.000	12 Laporan	Rp 50.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	1 Dokumen	Rp 3.600.000	1 Dokumen	Rp 3.600.000	1 Dokumen	Rp 3.600.000	1 Dokumen	Rp 3.600.000	1 Dokumen	Rp 3.600.000	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 30.000.000	Rp -	3 Dokumen	Rp 30.000.000	3 Dokumen	Rp 30.000.000	3 Dokumen	Rp 30.000.000	3 Dokumen	Rp 30.000.000	3 Dokumen	Rp 30.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 26.050.000	Rp 234.300.000		Rp 50.000.000		Rp 50.000.000		Rp 50.000.000		Rp 50.000.000		Rp 50.000.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Rp 25.000.000	Rp -	10 Unit	Rp 20.000.000	10 Unit	Rp 20.000.000	10 Unit	Rp 20.000.000	10 Unit	Rp 20.000.000	10 Unit	Rp 20.000.000	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Rp 1.050.000	Rp 234.300.000	5 Unit	Rp 30.000.000	5 Unit	Rp 30.000.000	5 Unit	Rp 30.000.000	5 Unit	Rp 30.000.000	5 Unit	Rp 30.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.799.270.060	Rp 666.047.549		Rp 241.000.000		Rp 246.000.000		Rp 251.000.000		Rp 256.000.000		Rp 261.000.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 18.002.500	Rp 14.000.000	1 Laporan	Rp 21.000.000	1 Laporan	Rp 21.000.000	1 Laporan	Rp 21.000.000	1 Laporan	Rp 21.000.000	1 Laporan	Rp 21.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp 1.164.717.600	Rp 125.321.600	1 Laporan	Rp 65.000.000	1 Laporan	Rp 70.000.000	1 Laporan	Rp 75.000.000	1 Laporan	Rp 80.000.000	1 Laporan	Rp 85.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp 5.000.000	Rp 19.180.000	1 Laporan	Rp 25.000.000	1 Laporan	Rp 25.000.000	1 Laporan	Rp 25.000.000	1 Laporan	Rp 25.000.000	1 Laporan	Rp 25.000.000	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp 611.549.960	Rp 507.545.949	1 Laporan	Rp 130.000.000	1 Laporan	Rp 130.000.000	1 Laporan	Rp 130.000.000	1 Laporan	Rp 130.000.000	1 Laporan	Rp 130.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 631.238.980	Rp 58.606.000		Rp 97.928.000		Rp 112.928.000		Rp 112.928.000		Rp 112.928.000		Rp 112.928.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rp 58.698.000	Rp 20.523.400	1 Unit	Rp 25.000.000	1 Unit	Rp 40.000.000	1 Unit	Rp 40.000.000	1 Unit	Rp 40.000.000	1 Unit	Rp 40.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rp 34.341.000	Rp 26.474.600	2 Unit	Rp 37.928.000	2 Unit	Rp 37.928.000	2 Unit	Rp 37.928.000	2 Unit	Rp 37.928.000	2 Unit	Rp 37.928.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Rp -	Rp 2.714.000	5 Unit	Rp 10.000.000	5 Unit	Rp 10.000.000	5 Unit	Rp 10.000.000	5 Unit	Rp 10.000.000	5 Unit	Rp 10.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rp 5.000.000	Rp 8.894.000	5 Unit	Rp 5.000.000	5 Unit	Rp 5.000.000	5 Unit	Rp 5.000.000	5 Unit	Rp 5.000.000	5 Unit	Rp 5.000.000	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp 533.199.980	Rp -	3 unit	Rp 20.000.000	3 unit	Rp 20.000.000	3 unit	Rp 20.000.000	3 unit	Rp 20.000.000	3 unit	Rp 20.000.000	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Konektifitas Darat	Rp 5.518.629.000	Rp 155.799.000	52,25	Rp 1.577.266.520	54,25	Rp 1.671.902.511	54,25	Rp 1.738.778.611	54,25	Rp 1.808.329.756	54,25	Rp 1.880.662.946	
	2 .Persenstase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal.			9%		12%		16%		19%		23%		
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Rp 200.000.000	Rp -		Rp 200.000.000		Rp 220.000.000		Rp 240.000.000		Rp 260.000.000		Rp 280.000.000	
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp 200.000.000	Rp -	1 Dokumen	Rp 100.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 20.000.000	1 Dokumen	Rp 30.000.000	1 Dokumen	Rp 40.000.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000	
Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Rp -		1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 20.000.000	1 Dokumen	Rp 30.000.000	1 Dokumen	Rp 40.000.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000	
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Rp -		1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000	
Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Rp -		1 Dokumen	Rp 20.000.000	1 Dokumen	Rp 20.000.000	1 Dokumen	Rp 20.000.000	1 Dokumen	Rp 20.000.000	1 Dokumen	Rp 20.000.000	
Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp -		1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 10.000.000	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana dan fasilitas keselamatan Transportasi Darat	Rp 3.878.386.0 00			Rp 280.000.00 0		Rp 280.000.00 0		Rp 280.000.00 0		Rp 280.000.00 0		Rp 280.000.00 0	
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Rp 1.000.000.0 00		0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Rp 1.468.040.0 00	Rp 1.200.000. 000	40 Unit	Rp 200.000.00 0	40 Unit	Rp 200.000.00 0	40 Unit	Rp 200.000.00 0	40 Unit	Rp 200.000.00 0	40 Unit	Rp 200.000.00 0	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Rp 1.000.000.0 00	Rp -	1 Unit	Rp 30.000.000	1 Unit	Rp 30.000.000	1 Unit	Rp 30.000.000	1 Unit	Rp 30.000.000	1 Unit	Rp 30.000.000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Rp 410.346.000	Rp 200.522.70 0	10 Unit	Rp 50.000.000	10 Unit	Rp 50.000.000	10 Unit	Rp 50.000.000	10 Unit	Rp 50.000.000	10 Unit	Rp 50.000.000	
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Ketersediaan Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe C	Rp 45.000.000	Rp -		Rp 120.000.00 0		Rp 120.000.00 0		Rp 320.000.00 0		Rp 120.000.00 0		Rp 320.000.00 0	
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Rp 45.000.000	Rp -	0 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp 100.000.00 0	0	Rp -	0 Dokumen	Rp -	0	Rp -	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	Rp -	Rp -	0 Dokumen	Rp -	0 Dokumen		1 Dokumen	Rp 100.000.000	0 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp 100.000.000	
Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Rp -	Rp -	Unit	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C	Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital	Rp -	Rp -	Unit	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Rp -	Rp -	Unit	Rp -	0	Rp -	1 Unit	Rp 200.000.000	0	Rp -	0	Rp -	
Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi	Rp -	Rp -	1 Orang	Rp 20.000.000	1 Orang	Rp 20.000.000	1 Orang	Rp 20.000.000	1 Orang	Rp 20.000.000	1 Orang	Rp 20.000.000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Rp -	Rp -	2 Unit	Rp 100.000.000	0	Rp -	0	Rp -	1 Unit	Rp 100.000.000	1 Unit	Rp 200.000.000	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rp 79.264.000	Rp 22.920.000		Rp 60.000.000		Rp 70.000.000		Rp 80.000.000		Rp 90.000.000		Rp 100.000.000	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp 34.432.000	Rp -	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 20.000.000	1 Dokumen	Rp 30.000.000	1 Dokumen	Rp 40.000.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 44.832.000	Rp 22.920.000	1 Laporan	Rp 50.000.000	1 Laporan	Rp 50.000.000	1 Laporan	Rp 50.000.000	1 Laporan	Rp 50.000.000	1 Laporan	Rp 50.000.000	
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 252.618.000	Rp 38.475.000		Rp 395.000.000		Rp 405.000.000		Rp 365.000.000		Rp 425.000.000		Rp 385.000.000	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Rp -	Rp -	1 Unit	Rp 200.000.000	1 Unit	Rp 200.000.000	1 Unit	Rp 150.000.000	1 Unit	Rp 200.000.000	1 Unit	Rp 150.000.000	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Rp 120.735.000	Rp 38.475.000	1 Orang	Rp 20.000.000	1 Orang	Rp 20.000.000	1 Orang	Rp 20.000.000	1 Orang	Rp 20.000.000	1 Orang	Rp 20.000.000	
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Rp -	Rp -	1 Unit	Rp 25.000.000	1 Unit	Rp 25.000.000	1 Unit	Rp 25.000.000	1 Unit	Rp 25.000.000	1 Unit	Rp 25.000.000	
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp -	Rp -	1 Dokumen	Rp 30.000.000	1 Dokumen	Rp 30.000.000	1 Dokumen	Rp 30.000.000	1 Dokumen	Rp 30.000.000	1 Dokumen	Rp 30.000.000	
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp -	Rp -	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 15.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 25.000.000	1 Laporan	Rp 30.000.000	
Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Rp -	Rp -	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 15.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 25.000.000	1 Laporan	Rp 30.000.000	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Rp 76.401.000	Rp -	2 Unit	Rp 50.000.000	2 Unit	Rp 50.000.000	2 Unit	Rp 50.000.000	2 Unit	Rp 50.000.000	2 Unit	Rp 50.000.000	
Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 55.482.000	Rp -	1 Laporan	Rp 30.000.000	1 Laporan	Rp 30.000.000	1 Laporan	Rp 30.000.000	1 Laporan	Rp 30.000.000	1 Laporan	Rp 30.000.000	
Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp -	Rp -	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan Jalan kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 160.185.000	Rp 54.465.000		Rp 327.266.520		Rp 346.902.511		Rp 293.778.611		Rp 393.329.756		Rp 355.662.946	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp 109.510.000	Rp 49.440.000	1 Laporan	Rp 107.266.520	1 Laporan	Rp 111.902.511	1 Laporan	Rp 103.778.611	1 Laporan	Rp 128.329.756	1 Laporan	Rp 135.662.946	
Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	Rp -	Rp -	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	
Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Rp -	Rp -	1 Unit	Rp 60.000.000	1 Unit	Rp 60.000.000	0	Rp -	1 Unit	Rp 60.000.000	0	Rp -	
Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 15.000.000	1 Dokumen	Rp 20.000.000	1 Dokumen	Rp 25.000.000	1 Dokumen	Rp 30.000.000	
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 10.830.000	Rp 5.025.000	1 Laporan	Rp 30.000.000	1 Laporan	Rp 30.000.000	1 Laporan	Rp 30.000.000	1 Laporan	Rp 30.000.000	1 Laporan	Rp 30.000.000	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Rp -	Rp -	1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp 60.000.000	1 Dokumen	Rp 70.000.000	1 Dokumen	Rp 80.000.000	1 Dokumen	Rp 90.000.000	
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Rp 39.845.000	Rp -	1 Laporan	Rp 50.000.000	1 Laporan	Rp 50.000.000	1 Laporan	Rp 50.000.000	1 Laporan	Rp 50.000.000	1 Laporan	Rp 50.000.000	
Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -		Rp 85.000.000		Rp 110.000.000		Rp 60.000.000		Rp 110.000.000		Rp 60.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Rp -	Rp -	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	
Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Rp -	Rp -	1 Orang	Rp 25.000.000	2 Orang	Rp 50.000.000	0	Rp -	2 Orang	Rp 50.000.000	0	Rp -	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Rp -	Rp -	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	
Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	Rp -	Rp -	1 Dokumen	Rp 20.000.000	1 Dokumen	Rp 20.000.000	1 Dokumen	Rp 20.000.000	1 Dokumen	Rp 20.000.000	1 Dokumen	Rp 20.000.000	
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rp 67.840.000	Rp -		Rp 20.000.000		Rp 30.000.000		Rp 10.000.000		Rp 40.000.000		Rp 10.000.000	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Rp 14.600.000	Rp -	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	0	Rp -	1 Laporan	Rp 30.000.000	0	Rp -	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Rp 17.880.000	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Rp 35.360.000	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Rp -	Rp -	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 10.000.000	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Angkutan untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 763.240.000	Rp 19.899.000		Rp 20.000.000		Rp 20.000.000		Rp 20.000.000		Rp 20.000.000		Rp 20.000.000	
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp 46.820.000	Rp 19.899.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Rp 716.420.000	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000	Rp -		Rp 25.000.000		Rp 25.000.000		Rp 25.000.000		Rp 25.000.000		Rp 25.000.000	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	1 Dokumen	Rp 20.000.000	1 Dokumen	Rp 20.000.000	1 Dokumen	Rp 20.000.000	1 Dokumen	Rp 20.000.000	1 Dokumen	Rp 20.000.000	
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000	Rp -	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /kota	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 22.096.000	Rp 20.040.000		Rp 20.000.000		Rp 20.000.000		Rp 20.000.000		Rp 20.000.000		Rp 20.000.000	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 22.096.000	Rp 20.040.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp -			Rp 25.000.000		Rp 25.000.000		Rp 25.000.000		Rp 25.000.000		Rp 25.000.000	
Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	2 Dokumen	Rp 25.000.000	2 Dokumen	Rp 25.000.000	2 Dokumen	Rp 25.000.000	2 Dokumen	Rp 25.000.000	2 Dokumen	Rp 25.000.000	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2. Konektivitas Sungai	Rp 2.477.013.000	Rp 10.179.000	30,00	Rp 345.000.000	30,00	Rp 358.800.000	30,00	Rp 373.152.000	30,00	Rp 388.078.080	30,00	Rp 403.601.203	
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -		Rp 50.000.000		Rp 50.000.000		Rp 50.000.000		Rp 50.000.000		Rp 50.000.000	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp -	Rp -	2 Dokumen	Rp 25.000.000	2 Dokumen	Rp 25.000.000	2 Dokumen	Rp 25.000.000	2 Dokumen	Rp 25.000.000	2 Dokumen	Rp 25.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	1 Laporan	Rp 25.000.000	1 Laporan	Rp 25.000.000	1 Laporan	Rp 25.000.000	1 Laporan	Rp 25.000.000	1 Laporan	Rp 25.000.000	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -		Rp 70.000.000		Rp 73.800.000		Rp 78.152.000		Rp 83.078.080		Rp 88.601.203	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp -	Rp -	3 Dokumen	Rp 50.000.000	3 Dokumen	Rp 50.000.000	3 Dokumen	Rp 50.000.000	3 Dokumen	Rp 50.000.000	3 Dokumen	Rp 50.000.000	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 23.800.000	1 Laporan	Rp 28.152.000	1 Laporan	Rp 33.078.080	1 Laporan	Rp 38.601.203	
Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Persentase Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Rp -	Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -		Rp 45.000.000		Rp 45.000.000		Rp 45.000.000		Rp 45.000.000		Rp 45.000.000	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp -	Rp -	1 Dokumen	Rp 25.000.000	1 Dokumen	Rp 25.000.000	1 Dokumen	Rp 25.000.000	1 Dokumen	Rp 25.000.000	1 Dokumen	Rp 25.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU		
Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha	Persentase Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha	Rp -	Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -		

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -		Rp 40.000.000		Rp 40.000.000		Rp 40.000.000		Rp 40.000.000		Rp 40.000.000	
Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	1 Dokumen	Rp 20.000.000	1 Dokumen	Rp 20.000.000	1 Dokumen	Rp 20.000.000	1 Dokumen	Rp 20.000.000	1 Dokumen	Rp 20.000.000	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	
Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Persentase Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Rp -	Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -		Rp 40.000.000		Rp 45.000.000		Rp 50.000.000		Rp 55.000.000		Rp 60.000.000	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 15.000.000	1 Dokumen	Rp 20.000.000	1 Dokumen	Rp 25.000.000	1 Dokumen	Rp 30.000.000	
Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 10.000.000	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	
Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp -	Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pempungan Lokal	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp -	Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp -			Rp 10.000.000		Rp 15.000.000		Rp 20.000.000		Rp 25.000.000		Rp 30.000.000	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp -	Rp -	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 15.000.000	1 Dokumen	Rp 20.000.000	1 Dokumen	Rp 25.000.000	1 Dokumen	Rp 30.000.000	
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp 2.457.623.000	Rp -		Rp 25.000.000		Rp 25.000.000		Rp 25.000.000		Rp 25.000.000		Rp 25.000.000	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Rp -	Rp -	1 Unit	Rp 25.000.000	1 Unit	Rp 25.000.000	1 Unit	Rp 25.000.000	1 Unit	Rp 25.000.000	1 Unit	Rp 25.000.000	
Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	Rp 142.500.000	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	Rp 2.315.123.000	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Rp -	Rp -	1 Unit	Rp 25.000.000	1 Unit	Rp 25.000.000	1 Unit	Rp 25.000.000	1 Unit	Rp 25.000.000	1 Unit	Rp 25.000.000	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp 13.390.000	Rp -		Rp 10.000.000		Rp 10.000.000		Rp 10.000.000		Rp 10.000.000		Rp 10.000.000	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilaksanakan	Rp 13.390.000	Rp -	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 10.000.000	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp 6.000.000	Rp 10.179.000		Rp 10.000.000		Rp 10.000.000		Rp 10.000.000		Rp 10.000.000		Rp 10.000.000	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Dilaksanakan	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp 6.000.000	Rp 10.179.000	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 10.000.000	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp -	Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi yang Dilakukan dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp -	Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilakukan	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp -	Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp -	Rp -		Rp 20.000.000		Rp 20.000.000		Rp 20.000.000		Rp 20.000.000		Rp 20.000.000	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan	Rp -	Rp -	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 10.000.000	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025	Target dan PAGU Indikatif Tahun -										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp -	Rp -	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 10.000.000	

Sumber: Dishub Kab. Bengkayang Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	
				Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	

Sumber: Dishub Kab. Bengkayang Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

4.2 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan dalam kurun waktu 2025–2029. Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					2030
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Rasio Konektivitas	%	82,5	82,5	82,5	83	83,5	84	84,25
2	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	41%	41%	53%	57%	61%	65%	70%
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	64,85	65,85	67,05	68,25	69,45	70,65	71,85

Sumber: Dishub Kab. Bengkayang Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

4.3 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) menggambarkan hasil dari pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan mendukung capaian nasional. Penetapan Indikator Kinerja Kunci ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Konektivitas Transportasi	% (Persen)	82,5	82.5	82.5	83	83.5	84	84.25	
2	Rasio Kepadatan Lalu Lintas	SMP/JAM (Satuan mobil penumpang/jam)	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,30	
3	Pemasangan Rambu-Rambu	%	3%	3%	3%	4%	5%	6%	8%	
4	Rasio Izin Trayek	%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	
5	Persentase Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)	%	7,15%	7,81%	8,62%	9,62%	10,89%	12,54%	14,75%	
6	Jumlah Barang yang terangkut angkutan umum	Unit	20.400	20.502	20.605	20.708	20.811	20.915	21.020	
7	Jumlah Arus penumpang angkutan umum	Orang	320.908	322.076	323.244	324.412	325.580	326.748	327.916	
8	Persentase layanan angkutan darat	%	0,0500%	0,0502%	0,0504%	0,0506%	0,0508%	0,0510%	0,0512%	
9	Jumlah Pelabuhan laut/udara/terminal bis	Unit	2	2	2	2	3	3	3	
10	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Unit	98	274	277	280	283	286	290	

Sumber: Dishub Kab. Bengkayang Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

BAB V PENUTUP

Pembangunan sektor transportasi di Kabupaten Bengkayang merupakan bagian integral dalam mewujudkan visi daerah, yaitu **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bengkayang yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan"**. Melalui Misi 3: **Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur**, Dinas Perhubungan mengambil peran strategis dalam menyediakan layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran-sasaran prioritas yaitu:

1. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas,
2. Meningkatnya keamanan dan keselamatan transportasi, dan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang sejumlah strategi dan arah kebijakan yang komprehensif. Antara lain melalui penyediaan perlengkapan jalan, pembangunan infrastruktur transportasi publik, digitalisasi sistem uji kendaraan, edukasi keselamatan lalu lintas, serta penguatan tata kelola dan kinerja ASN bidang transportasi.

Pelaksanaan strategi dan kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan transportasi, tetapi juga untuk mendukung konektivitas antarwilayah, efisiensi mobilitas orang dan barang, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Upaya tersebut dilandasi dengan semangat integritas, profesionalisme, serta pemanfaatan teknologi informasi dan data secara berkelanjutan.

Dengan adanya Rencana Strategis Tahun 2025-2029 ini, diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembangunan transportasi secara efektif. Sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat,



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem transportasi yang mendukung kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bengkayang.

Demikian Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang ini disusun untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang khususnya dan Pemerintah Kabupaten Bengkayang umumnya dalam 5 (lima) tahun kedepan.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PERHUBUNGAN

DAFTAR LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Guna Baru Rangkang Telp. (0562) 441807, 441612, 441553
Fax. (0562) 441808, 441057
B E N G K A Y A N G KodePos : 79282

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 15 /DISHUB/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKAYANG PERIODE 2025 - 2029

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan rangkaian kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang periode 2025 - 2029 maka, perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang periode 2025 - 2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang periode 2025 - 2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah
mempunyai tugas memberikan panduan, rekomendasi dan kepemimpinan kepada Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang periode 2025 - 2029;
 - b. Penanggung jawab
mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan pada Tim berkenaan dengan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang periode 2025 - 2029, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan serta bertanggung jawab atas tersusunnya Renstra;

- c. ketua
melakukan koordinasi dengan tim maupun pihak-pihak terkait berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang periode 2025 - 2029;
- d. sekretaris
mempunyai tugas menyiapkan agenda kerja tim, menyiapkan administrasi kegiatan serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan ;
- e. anggota
- 1) melakukan koordinasi dengan pihak - pihak terkait dalam proses penyusunan Renstra;
 - 2) menyusun dokumen Renstra sesuai dengan RPJMD kabupaten Bengkayang tahun 2025 - 2029; dan
 - 3) menyampaikan hasil akhir dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang periode 2025 - 2029 kepada penanggung jawab.

- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 29 ~~7~~ ^{Desember} 2025


SEKRETARIS DAERAH,
BENGKAYANG, SE. M.M
Pembina Muda/ IV.c
NIP. 19691116 200003 1 004

TEMBUSAN :
1. Bupati Bengkayang

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
 NOMOR : 15 / DISHUB/TAHUN 2025
 TANGGAL : 24 Februari 2025
 TENTANG :
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKAYANG PERIODE 2025
 2029.

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang	Pengarah
2.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang	Pcnanggung jawab
3.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang	Ketua
4.	Kasubag Rencana Kerja dan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
5.	Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang	Anggota
6.	Kabid Lalu Lintas, Angkutan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang	Anggota
7.	Kepala Seksi Angkutan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang	Anggota
8.	Kepala Seksi Lalu lintas dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang	Anggota
9.	Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang	Anggota
10.	Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi Pelayaran dan Udara Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang	Anggota
11.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang	Anggota
12.	3 (tiga) orang ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang	Anggota

SEKRETARIS DAERAH,

 H. S. H. S., SE., M.M
 Sekretaris Muda / IV.c
 NIP. 462116 200003 1 004